



# RENSTRA 2024-2026

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Jalan Majapahit No. 09 Mataram Telp. 631585,  
Fax. (0370) 622502 (Pusat) M A T A R A M  
KODE POS : 83125 (Pusat) 83236 (Depo)

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 mengakomodir kebutuhan sesuai dinamika lingkungan strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta proyeksi hingga tahun 2024, dalam kerangka mendukung reformasi birokrasi.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 difokuskan pada target kinerja masing-masing pemangku kepentingan berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai struktur organisasi dengan menjaga komitmen terhadap target kinerja prioritas daerah dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026.

Dalam pelaksanaan renstra dimaksud diisyaratkan komitmen dan kinerja yang semakin baik serta integritas seluruh jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menjawab tugas dan tanggung jawab birokrasi pemerintahan serta harapan publik yang semakin besar dimasa mendatang. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026, diharapkan dapat menjadi panduan operasional dalam melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan sistematis. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya dalam menjalankan pengabdian kepada Nusa Tenggara Barat.

Mataram, Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



**H. Amir, S.Pd., MM.**  
NIP. 19720802 199303 1 013

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | ii  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | iii |
| <b>DAFTAR STRUKTUR ORGANISASI .....</b>   | iv  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | v   |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |     |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1   |
| 1.2 Landasan Hukum .....  | 4   |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....   | 6   |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....   | 7   |
| <br><b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI NTB</b>  |     |
| 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....   | 9   |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....  | 17  |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....  | 18  |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....   | 25  |
| <br><b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI NTB</b>   |     |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan .....   | 27  |
| 3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota .....  | 28  |
| 3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD .....  | 31  |
| 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis .....   | 32  |
| <br><b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>  |     |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran .....  | 34  |
| 4.2 <i>Cascading</i> Kinerja Perangkat Daerah .....   | 36  |
| <br><b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>  |     |
| <br><b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>  |     |
| 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024-2026 .....                             | 41  |
| 6.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Program Unggulan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2023 ..... | 58  |

|                 |  |           |
|-----------------|--|-----------|
| <b>BAB VII</b>  | <b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b> | <b>62</b> |
| <b>BAB VIII</b> | <b>PENUTUP .....</b>                               | <b>64</b> |

## **DAFTAR STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB ..... 12

## DAFTAR TABEL

|                    |  |    |
|--------------------|--|----|
| <b>Tabel 2.2.1</b> | <b>Data Sumber Daya Aparatur .....</b>   | 17 |
| <b>Tabel 2.2.2</b> | <b>Data Sumber Daya Aparatur Menurut Golongan .....</b>  | 17 |
| <b>Tabel 2.2.3</b> | <b>Aset yang Dikelola .....</b>  | 18 |
| <b>Tabel 2.3.1</b> | <b>Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2023 .....</b>   | 23 |
| <b>Tabel 2.3.2</b> | <b>Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2023 .....</b>                          | 24 |
| <b>Tabel 4.1.1</b> | <b>Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2024-2026 .....</b>  | 35 |
| <b>Tabel 4.2.1</b> | <b>Cascading Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2024-2026 .....</b>   | 37 |
| <b>Tabel 5.1.1</b> | <b>Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....</b>  | 39 |
| <b>Tabel 6.1.1</b> | <b>Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun2024-2026 .....</b>                              | 41 |
| <b>Tabel 6.2.1</b> | <b>Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Utama Pendukung Program Unggulan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 .....</b> | 60 |
| <b>Tabel 7.1.1</b> | <b>Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2024-2026 .....</b>   | 63 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|  |   |
|--|---|
| Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renstra ..... | 3 |
|--|---|

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Upaya membangun kualitas manusia budaya literasi perlu dijadikan sebagai fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berkualitas dan sejahtera. Literasi adalah bentuk *cognitive skill* memampukan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami, dan mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam kegiatan-kegiatan yang produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan.

Selanjutnya Arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mengandung informasi yang sejatinya merupakan memori kolektif dan jati diri bangsa. Dalam hal ini bidang kearsipan dapat berperan secara nyata dalam memperkokoh ketahanan budaya melalui penyelamatan, pelestarian, dan pemanfaatan arsip guna mendukung pembangunan karakter bangsa. Pemanfaatan arsip dalam rangka pembangunan karakter akan melibatkan semua komponen bangsa dalam berbagai bentuk program publik dan media sehingga dapat diakses secara murah, mudah, dan langsung oleh masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut Perangkat daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan lima tahunan Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 264 ayat 5) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Pasal 342).

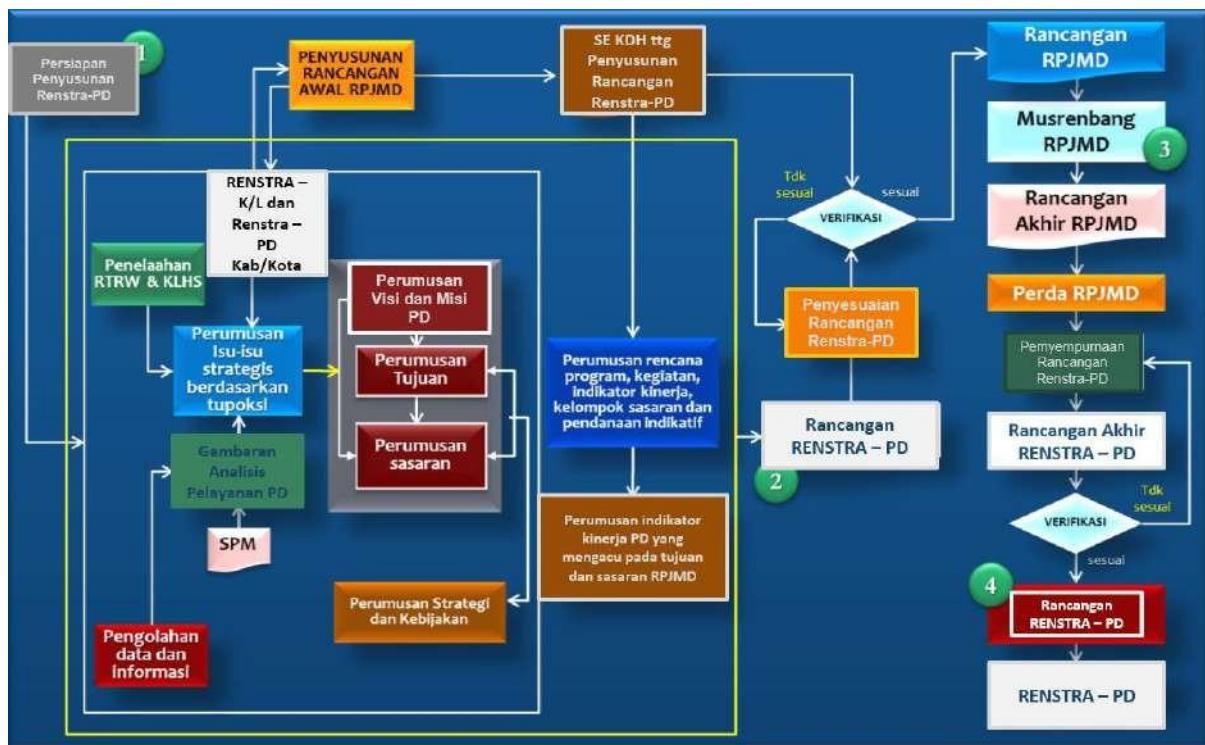
Renstra Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka

pelaksanaan urusan fungsi penunjang dalam bidang perencanaan pembangunan literasi masyarakat. Dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Dokumen Renstra Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan formal disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan Renstra meliputi: (1) persiapan penyusunan (2) penyusunan Rancangan Awal (3) penyusunan Rancangan (4) penyusunan Rancangan Akhir dan (5) penetapan Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

**Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi NTB**



## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104); Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Karsipan. Arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh Negara;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pengalihan Arsip ke Mikrofilm;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4373);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
13. PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
14. PP Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah;
25. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016, tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
30. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 15 Februari 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dimaksudkan untuk mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Maksud penyusunan Renstra sebagai berikut:

1. Sebagai rumusan untuk menentukan sasaran dan arah kebijakan program unggulan dalam skala prioritas;
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pencapaian setiap kurun waktu yang telah ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan; dan
3. Sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

1. Sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahun;
2. Sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB;
3. Sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB;
4. Untuk mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi kepada masa depan, serta peningkatan mutu berbagai produk perencanaan secara optimal; dan
5. Untuk mencapai sasaran yang meliputi kebijaksanaan program dan kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2024-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:

- BAB I PENDAHULUAN: Menyajikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH: Menyajikan tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumberdaya perangkat daerah, kinerja

pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH: Menyajikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah dan penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN: Menyajikan tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah Tahun 2024-2026, *Cascading* kinerja Perangkat Daerah.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menyajikan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah Tahun 2024-2026.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN: Menyajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pagu.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN: Memuat penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
- BAB VIII PENUTUP

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB**

#### **2.1.1 Tugas Pokok**

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik yaitu urusan perpustakaan dan karsipan. Berikut Tugas Pokok Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi NTB:

- a. Merumuskan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Deposit, Pengolahan Dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, Pengelolaan, Pembinaan, Dan Pengawasan Karsipan, Perlindungan, Penyelamatan Dan Pelayanan Karsipan, Pelayanan Perpustakaan Dan Karsipan serta Kesekretariatan;
- b. Merumuskan bahan norma, standard pedoman dan kriteria (NSPK) perpustakaan dan karsipan;
- c. Merumuskan bahan kebijakan pembudayaan gemar membaca;
- d. Merumuskan bahan dan menetapkan kebijakan pengelolaan perpustakaan dan karsipan;
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengumpulan dan pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) serta naskah kuno milik daerah;
- f. Merumuskan bahan kebijakan untuk penerbitan Katalog Induk Daerah (KID);
- g. Merumuskan bahan kebijakan pengumpulan dan pelestarian naskah kuno milik daerah;
- h. Merumuskan bahan kebijakan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah provinsi;

- i. Merumuskan bahan kebijakan teknis pengembangan jabatan fungsional pustakawan dan fungsional arsiparis di skala provinsi sesuai kebijakan nasional;
- j. Merumuskan bahan kebijakan teknis penilaian dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Tertentu pustakawan dan arsiparis;
- k. Merumuskan bahan pelaksanaan layanan jasa koleksi bahan rujukan, naskah, multimedia dan jaringan otomasi perpustakaan dan kearsipan;
- l. Merumuskan bahan dan menyelenggarakan pembinaan, pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis;
- m. Merumuskan bahan dan menyelenggarakan preservasi, perlindungan dan penyelamatan arsip serta melakukan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Provinsi, dan membuat daftar arsip;
- n. Merumuskan bahan dan menyelenggarakan kerjasama dan informasi ilmiah perpustakaan dan kearsipan;
- o. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan bahan/materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Dinas kegiatan Dinas;
- p. Merumuskan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;
- q. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Adapun ringkasan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB adalah merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan umum dibidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Deposit dan Informasi Perpustakaan, Pengelolaan Arsip Dinamis, Pengelolaan Arsip Statis, Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan serta Kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Perpustakaan dan Karsipan;
- b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Perpustakaan dan Karsipan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Perpustakaan dan Karsipan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Perpustakaan dan Karsipan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi NTB, dibantu oleh :

1. Sekretariat, Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Program, Keuangan dan Umum, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum.

Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Umum.

- b. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, berikut tugas dan fungsi:

- a. Tugas

Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pembinaan Perpustakaan, Pengembangan Minat Baca dan Promosi Perpustakaan, Kelembagaan dan Kerjasama.

- b. Fungsi

- Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
- Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
  - Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
- c. Bidang Deposit, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, berikut tugas dan fungsi:
- a. Tugas  
Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Deposit Perpustakaan, Pelestarian dan Alih Media Perpustakaan dan Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan.
  - b. Fungsi
    - Penyusunan kebijakan strategis dibidang Deposit, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
    - Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Deposit, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
    - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Deposit, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
    - Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Deposit, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan; dan
    - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
- d. Bidang Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, berikut tugas dan fungsi:
- a. Tugas  
Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pembinaan Kearsipan, Pengelolaan Arsip Dinamis, Akuisisi dan Penyusutan.

b. Fungsi

- Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
- Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
- Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

e. Bidang Perlindungan, Penyelamatan dan Pelayanan Kearsipan, berikut tugas dan fungsi:

a. Tugas

Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Penyelamatan dan Pengolahan Arsip Statis, Penyimpanan dan Pelestarian Arsip, Penyediaan dan Autentifikasi Kearsipan.

b. Fungsi

- Penyusunan kebijakan strategis dibidang Perlindungan dan Penyelamatan Kearsipan;
- Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Perlindungan dan Penyelamatan Kearsipan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Perlindungan dan Penyelamatan Kearsipan;
- Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Perlindungan dan Penyelamatan Kearsipan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

f. Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan, berikut tugas dan fungsi:

a. Tugas

Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Otomatisasi Perpustakaan dan Kearsipan, Pelayanan Perpustakaan dan Pelayanan Kearsipan.

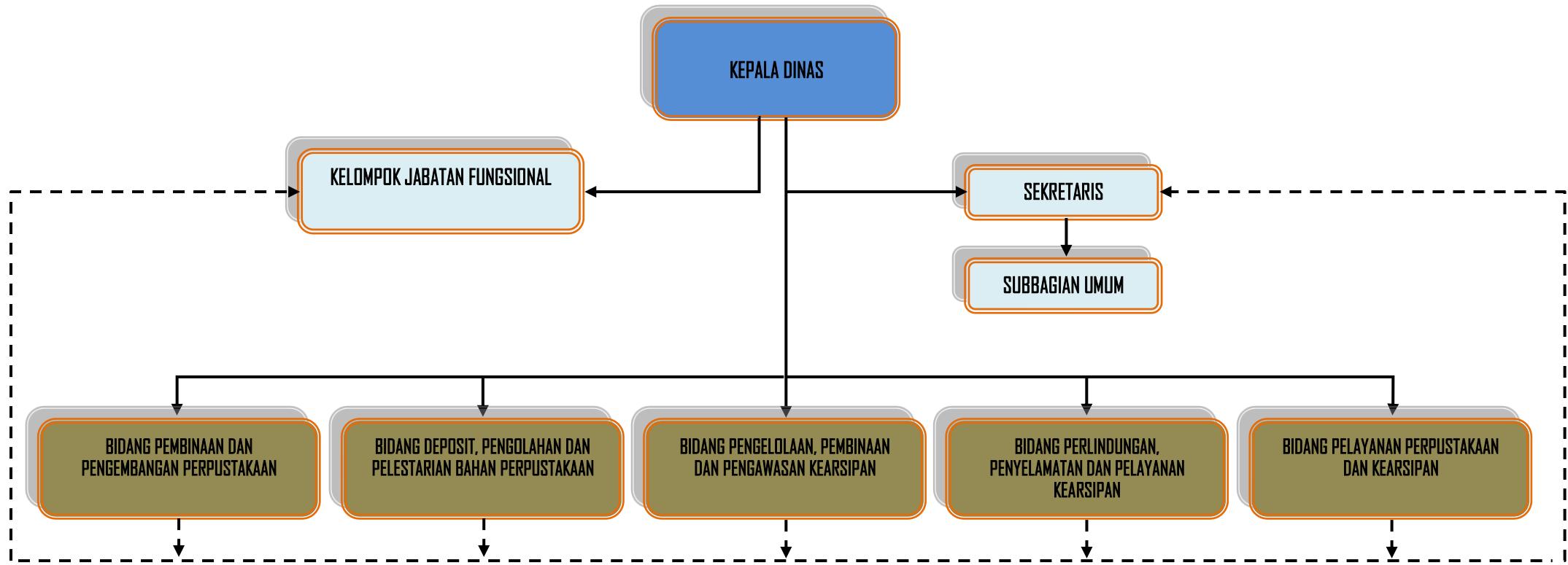
b. Fungsi

- Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan;
- Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan;
- Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada gambar 2.1.1, sebagai berikut:

**Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB**  
**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 8 Tahun 2023, tangat 15 Februari 2023.**



## **2.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

### **2.2.1 Sumber Daya Aparatur**

Sumber daya aparatur adalah penggerak utama roda pemerintahan. Jumlah personil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan Desember 2023, adalah sebanyak 87 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Aparatur (SDA) ditinjau dari status kepegawaian

**Tabel 2.2.1 Data Sumber Daya Aparatur (SDA)**

| No.          | Status Kepegawaian | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah (Orang) |
|--------------|--------------------|-----------|-----------|----------------|
| 1.           | ASN                | 45        | 41        | 86             |
| 2.           | PTT                | 0         | 1         | 1              |
| <b>TOTAL</b> |                    | <b>45</b> | <b>42</b> | <b>87</b>      |

- b. Sumber Daya Aparatur Menurut Golongan Kepangkatan

**Tabel 2.2.2 Data Sumber Daya Aparatur Menurut Golongan**

| No.          | Golongan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah (Orang) |
|--------------|----------|-----------|-----------|----------------|
| 1.           | IV E     | 0         | 0         | 0              |
| 2.           | IV D     | 0         | 0         | 0              |
| 3.           | IV C     | 3         | 0         | 3              |
| 4.           | IV B     | 5         | 7         | 12             |
| 5.           | IV A     | 2         | 4         | 6              |
| 6.           | III D    | 7         | 10        | 17             |
| 7.           | III C    | 3         | 3         | 6              |
| 8.           | III B    | 5         | 8         | 13             |
| 9.           | III A    | 3         | 4         | 7              |
| 10.          | II D     | 11        | 4         | 15             |
| 11.          | II C     | 1         | 1         | 2              |
| 12.          | II B     | 2         | 0         | 2              |
| 13.          | II A     | 0         | 0         | 0              |
| 14.          | I D      | 3         | 0         | 3              |
| 15.          | I C      | 0         | 0         | 0              |
| <b>TOTAL</b> |          | <b>45</b> | <b>41</b> | <b>86</b>      |

c. Aset yang Dikelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB

**2.2.3 Tabel Aset yang Dikelola Desember 2023**

| No. | Jenis Asset                      | Jumlah               | Harga         |
|-----|----------------------------------|----------------------|---------------|
| 1   | Tanah Bangunan dan Gedung Kantor | 1.500 m <sup>2</sup> | 332.750.000   |
| 2   | Tanah Bangunan dan Gedung Kantor | 5.000 m <sup>2</sup> | 300.600.000   |
| 3   | Tanah Bangunan dan Gedung Kantor | 155 m <sup>2</sup>   | 4.339.500     |
| 4   | Tanah Bangunan dan Gedung Kantor | 2.650 m <sup>2</sup> | 1.722.500.000 |
| 5   | Tanah Bangunan dan Gedung Kantor | 1.258 m <sup>2</sup> | 50.240.000    |
| 6   | Tanah Bangunan dan Gedung Kantor | 1.000 m <sup>2</sup> | 40.000.000    |
| 7   | Tanah Bangunan dan Gedung Kantor | 388 m <sup>2</sup>   | 15.520.000    |
| 8   | Tanah Bangunan Rumah Dinas       | 388 m <sup>2</sup>   | 15.520.000    |
| 9   | Kendaraan Roda 4                 | 17 buah              | 2.726.564.196 |
| 10  | Kendaraan Roda 2                 | 31 buah              | 330.112.501   |
| 11  | Sepeda Listrik                   | 4 buah               | 84.000.000    |

**2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB**

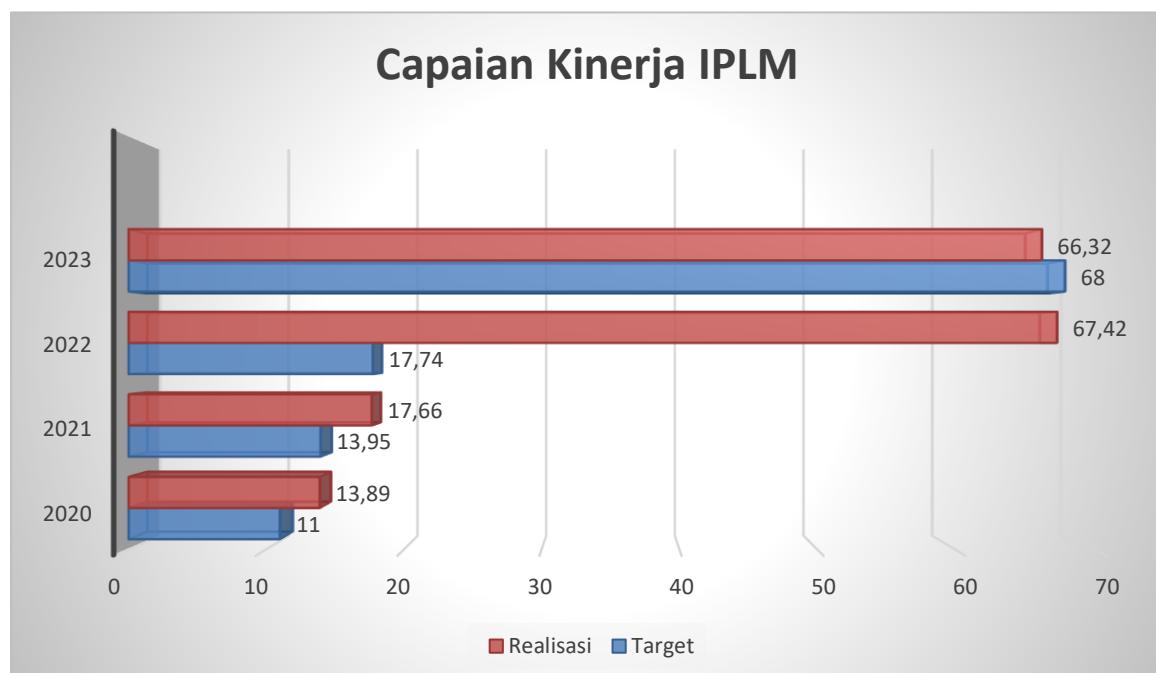
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat dalam mencapai budaya literasi masyarakat dengan pengukuran pada Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat dan Aspek Masyarakat.

Sebagai wujud kinerja dan kerjasama antara pusat dan daerah di bidang Perpustakaan, maka Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bersama Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB sebagai Pembina untuk provinsi NTB melakukan pengukuran kinerja daerah terkait perkembangan literasi di daerah, melalui sebuah instrument pengukuran terhadap usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kab./kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna mencapai budaya literasi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Perpustakaan Nasional RI telah merilis Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) untuk wilayah Provinsi NTB. Pada tahun 2020, berdasarkan data Perpustakaan Nasional RI dalam mengukur Indeks Pembangunan Literasi

Masyarakat (IPLM) pada 34 provinsi di Indonesia, posisi Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada urutan 14 dengan indeks 13,89. Sementara hasil IPLM 2021, urutan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada urutan ke 10 dengan indeks 17,66. Selanjutnya di Tahun 2022 hasil IPLM dengan indeks 67,42. Berikutnya hasil IPLM Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 sebesar 66,32.

**Tabel 2.3.1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)  
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Hasil IPLM per Kab/Kota provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2023 seperti yang tersaji sebagai berikut.



## 1. Indeks IPLM Tahun 2020 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Indeks IPLM 2020 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah sebesar 13,89.

**Tabel 2.3.2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat  
Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020**

| <b>INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI<br/>MASYARAKAT</b> |  | <b>: 13,89</b> |
|---|--|----------------|
| 1.  | Pemerataan Layanan Perpustakaan<br>(UPLM1)                 | : 0,0011       |
| 2.  | Ketercukupan Koleksi (UPLM2)                               | : 0,0916       |
| 3.  | Ketercukupan Tenaga Perpustakaan<br>(UPLM3)                | : 0,0001       |
| 4.  | Tingkat Kunjungan Masyarakat/ Hari<br>(UPLM4)              | : 0,0004       |
| 5.  | Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)                               | : 0,0006       |
| 6.  | Keterlibatan Masyarakat di Kegiatan<br>Sosialisasi (UPLM6) | : 0,0042       |
| 7.  | Anggota Perpustakaan (UPLM7)                               | : 0,0410       |



Jumlah Penduduk (2019):  
**5.070.385**

Jumlah Penduduk Usia  
Sekolah 2019 (5-19 Tahun):  
**1.432.090**

Jumlah Penduduk  
Usia Pendidikan Tinggi 2019 (20-24  
Tahun):  
**430.484**

| <b>NO.</b> | <b>INDIKATOR INDEKS<br/>PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT</b>                           | <b>NILAI</b> | <b>INTERPRETASI</b>   |
|------------|---|--------------|---|
| 1.         | Rasio Ketersediaan Perpustakaan   |              |   |
|            | a. Rasio ketersediaan perpustakaan umum   | 0,00025      | Terdapat 25 perpustakaan per 100.000 penduduk                                     |
|            | b. Rasio ketersediaan perpustakaan sekolah  | 0,00281      | Terdapat 281 perpustakaan per 100.000 penduduk usia sekolah                       |
|            | c. Rasio ketersedian perpustakaan Perguruan Tinggi                                    | 0,00011      | Terdapat 11 perpustakaan per 100.000 penduduk usia pendidikan tinggi              |
| 2.         | Percentase Perpustakaan Dipersepsi ber-SNP  | 57%          | Terdapat 57% perpustakaan yang dipersepsi memenuhi standar nasional perpustakaan  |
| 3.         | Percentase Jumlah Koleksi Buku yang Dipinjam Terhadap Jumlah Koleksi                  | 52,8%        | Terdapat 52,8% buku yang dipinjam dari total jumlah koleksi                       |
| 4.         | Rasio Ketercukupan Koleksi Berdasarkan IFLA/UNESCO                                    | 0,0458       | <b>Belum Memenuhi</b>   |
| 5.         | Kekurangan Jumlah Koleksi Berdasarkan IFLA/UNESCO                                     | 9.676.206    | Kekurangan koleksi di PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT sebanyak 9.676.206             |
| 6.         | Tingkat Ketercukupan Tenaga Perpustakaan  |              |   |
|            | a. Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan   | 13.630       | 1 tenaga perpustakaan melayani 13.630 penduduk; Tidak Mencukupi                   |
|            | b. Rasio Ketercukupan Pustakawan Memiliki SK Fungsional/Kualifikasi Ilmu Perpustakaan | 55.719       | 1 pustakawan, melayani 55.719 penduduk; Belum Mencukupi                           |
|            | c. Percentase Pustakawan Memiliki SK Fungsional                                       | 17,5%        | Terdapat 17,5% tenaga perpustakaan yang merupakan Pustakawan dengan SK Fungsional |

|  |          |   |
|--|----------|---|
| d. Persentase Pustakawan Sesuai Kualifikasi                          | 7,0%     | Terdapat 7% tenaga perpustakaan yang merupakan Pustakawan dengan SK Fungsional                    |
| e. Persentase Tenaga Teknis  | 75,5%    | Terdapat 75,5% tenaga perpustakaan yang merupakan tenaga teknis                                   |
| 7. Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan                                  | 0,04%    | Persentase jumlah kunjungan per hari dibagi jumlah penduduk sebanyak 0,04%: Belum Ideal           |
| 8. Tingkat Keaktifan Kegiatan Sosialisasi & Pemanfaatan Perpustakaan | 5,1%     | Keaktifan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan KIE & pemanfaatan perpustakaan sebanyak 5,1% |
| 9. Tingkat Engagement Anggota Perpustakaan                           | 4,1%     | Terdapat 4,1% penduduk yang merupakan anggota perpustakaan  |
| 10. Rata-rata Anggaran Pengembangan Perpustakaan per Jumlah Penduduk | Rp 3.935 | Terdapat anggaran pengembangan perpustakaan sebesar Rp 3.935 per jumlah penduduk                  |

## 2. Indeks IPLM Tahun 2021 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Indeks IPLM 2021 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah sebesar 17,66.

**Tabel 2.3.3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat  
Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021**

| <b>INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT : 17,66</b>      |           |  |
|--|-----------|--|
| 1. Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)                 | : 0,00084 |  |
| 2. Ketercukupan Koleksi (UPLM2)                            | : 0,10667 |  |
| 3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)                | : 0,00008 |  |
| 4. Tingkat Kunjungan Masyarakat/ Hari (UPLM4)              | : 0,00022 |  |
| 5. Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)                            | : 0,00069 |  |
| 6. Keterlibatan Masyarakat di Kegiatan Sosialisasi (UPLM6) | : 0,00824 |  |
| 7. Anggota Perpustakaan (UPLM7)                            | : 0,05986 |  |

| <b>NO.</b> | <b>INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT</b> | <b>NILAI</b> | <b>INTERPRETASI</b>  |
|------------|---|--------------|--|
| 1.         | Rasio Ketersediaan Perpustakaan                         |              |  |
|            | a. Rasio Ketersediaan Perpustakaan Umum                 | 0,00024      | Terdapat 24 perpustakaan per 100.000 penduduk                        |
|            | b. Rasio Ketersediaan Perpustakaan Sekolah              | 0,00217      | Terdapat 217 perpustakaan per 100.000 penduduk usia sekolah          |
|            | c. Rasio Ketersediaan Perpustakaan Perguruan Tinggi     | 0,00020      | Terdapat 20 perpustakaan per 100.000 penduduk usia pendidikan tinggi |
| 2.         | Persentase Perpustakaan Dipersensi ber-SNP              | 82,5%        | Terdapat 82,5% perpustakaan yang                                     |

|     |  |            |  |   |
|-----|--|------------|--|---|
|     |  |            |  | dipersepsi memenuhi standar nasional perpustakaan |
| 3.  | Persentase Jumlah Koleksi Buku yang Dipinjam Terhadap Jumlah Koleksi               | 14,9%      | Terdapat 14,9% buku yang dipinjam dari total jumlah koleksi  |   |
| 4.  | Rasio Ketercukupan Koleksi Berdasarkan IFLA/UNESCO                                 | 0,0533     | Belum Memenuhi   |   |
| 5.  | Kekurangan Jumlah Koleksi Berdasarkan IFLA/UNESCO                                  | 10.072.699 | Kekurangan koleksi di PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT sebanyak 10.072.699                                   |   |
| 6.  | Tingkat Ketercukupan Tenaga Perpustakaan   |            |  |   |
| a.  | Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan   | 12.488     | 1 tenaga perpustakaan melayani 12.488 penduduk; Tidak Mencukupi  |   |
| b.  | Rasio Ketercukupan Pustakawan Memiliki SK Fungsional/Kualifikasi Ilmu Perpustakaan | 120.911    | 1 pustakawan, melayani 120.911 penduduk; Belum Mencukupi   |   |
| c.  | Persentase Pustakawan Memiliki SK Fungsional                                       | 5,2%       | Terdapat 5,2% tenaga perpustakaan yang merupakan Pustakawan dengan SK Fungsional                         |   |
| d.  | Persentase Pustakawan Sesuai Kualifikasi   | 5,2%       | Terdapat 5,2% tenaga perpustakaan yang merupakan Pustakawan dengan SK Fungsional                         |   |
| e.  | Persentase Tenaga Teknis Memiliki Sertifikasi                                      | 23,5%      | Terdapat 23,5% tenaga perpustakaan yang merupakan tenaga teknis yang memiliki sertifikasi keperpustakaan |   |
| f.  | Persentase Tenaga Teknis Tanpa Sertifikasi   | 66,2%      | Terdapat 66,2% tenaga perpustakaan yang merupakan tenaga teknis tanpa sertifikasi keperpustakaan         |   |
| 7.  | Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan   | 0,0%       | Persentase jumlah kunjungan per hari dibagi jumlah penduduk sebanyak 0,02%: Belum Ideal                  |   |
| 8.  | Tingkat Keaktifan Kegiatan Sosialisasi & Pemanfaatan Perpustakaan                  | 0,8%       | Keaktifan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan KIE & pemanfaatan perpustakaan sebanyak 0,8%        |   |
| 9.  | Tingkat Engagement Anggota Perpustakaan  | 6,0%       | Terdapat 6% penduduk yang merupakan anggota perpustakaan   |   |
| 10. | Rata-rata Anggaran Pengembangan Perpustakaan per Jumlah Penduduk                   | Rp. 4.139  | Terdapat anggaran pengembangan perpustakaan sebesar Rp. 4.139 per jumlah penduduk                        |   |

### 3. Indeks IPLM Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Indeks IPLM 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah sebesar 67,42

**Tabel 2.3.4 Rekapitulasi UPLM per Kab/Kota  
Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022**

| Kode                       | Kab./Kota     | UPLM1         | UPLM2         | UPLM3         | UPLM4         | UPLM5         | UPLM6         | UPLM7         | IPLM         |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 52.01                      | Lombok Barat  | 0,0037        | 1,7311        | 0,0041        | 0,4299        | 1,6904        | 0,2711        | 0,4846        | 65,93        |
| 52.02                      | Lombok Tengah | 0,0021        | 1,3985        | 0,0044        | 0,3514        | 1,7491        | 0,2385        | 0,5483        | 61,32        |
| 52.03                      | Lombok Timur  | 0,0024        | 1,8504        | 0,0010        | 0,4335        | 1,4942        | 0,2947        | 0,6661        | 67,75        |
| 52.04                      | Sumbawa       | 0,0025        | 1,5890        | 0,0053        | 0,3911        | 1,5871        | 0,3098        | 0,7048        | 65,57        |
| 52.05                      | Dompu         | 0,0020        | 1,1426        | 0,0030        | 0,3921        | 1,0880        | 0,2995        | 0,3889        | 47,37        |
| 52.06                      | Bima          | 0,0025        | 1,6265        | 0,0037        | 0,4061        | 1,5474        | 0,2856        | 0,6730        | 64,93        |
| 52.07                      | Sumbawa Barat | 0,0036        | 2,3592        | 0,0048        | 0,4500        | 1,4428        | 0,3132        | 0,7678        | 76,30        |
| 52.08                      | Lombok Utara  | 0,0035        | 1,8632        | 0,0065        | 0,4366        | 1,2502        | 0,3823        | 1,1767        | 73,13        |
| 52.71                      | Kota Mataram  | 0,0025        | 2,3507        | 0,0010        | 0,4649        | 2,0322        | 0,3823        | 1,1695        | 91,47        |
| 52.72                      | Kota Bima     | 0,0025        | 1,2782        | 0,0085        | 0,4333        | 1,4467        | 0,3111        | 0,7494        | 60,42        |
| <b>Nusa Tenggara Barat</b> |               | <b>0,0027</b> | <b>1,7189</b> | <b>0,0042</b> | <b>0,4189</b> | <b>1,5328</b> | <b>0,3088</b> | <b>0,7329</b> | <b>67,42</b> |

Pencapaian nilai IPLM Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 67,42 dan masuk ke dalam kategori Sedang. Nilai IPLM tertinggi dicapai Kota Mataram dengan nilai 91,47, sedangkan nilai terendah oleh Kab. Dompu dengan nilai 47,37.

**Tabel 2.3.5 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022**

| <b>INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT</b> |  | <b>: 67,42</b> |    |
|---|--|----------------|---|
| 1.  | Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)                        | : 0,0027       |   |
| 2.  | Pemerataan Koleksi Perpustakaan (IPLM2)                        | : 1,7189       | <b>Jumlah Penduduk</b><br>(BPS 2020)<br><b>5.125.622</b>                              |
| 3.  | Pemerataan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)                         | : 0,0042       | <b>Jumlah Penduduk Usia Sekolah</b><br>(Kemendikbud dan BPS 2022)<br><b>1.023.228</b> |
| 4.  | Tingkat Kunjungan Pemustaka (UPLM4)                            | : 0,4189       | <b>Jumlah Penduduk Usia Perguruan Tinggi</b><br>(BPS 2022)<br><b>138.957</b>          |
| 5.  | Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)                                   | : 1,5328       |   |
| 6.  | Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6) | : 0,3088       |   |
| 7.  | Jumlah Pemustaka (UPLM7)                                       | : 0,7329       |   |

| <b>NO.</b> | <b>INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN</b>                   | <b>NILAI</b> | <b>INTERPRETASI</b>  |
|------------|---|--------------|--|
| 1.         | Rasio Ketersediaan Perpustakaan                       |              |  |
|            | a. Rasio ketersediaan perpustakaan umum               | 0,0001       | Terdapat 14 perpustakaan per 100.000 penduduk  |
|            | b. Rasio ketersediaan perpustakaan sekolah            | 0,0012       | Terdapat 120 perpustakaan per 100.000 penduduk usia sekolah                                  |
|            | c. Rasio ketersedian perpustakaan Perguruan tinggi    | 0,0013       | Terdapat 129 perpustakaan per 100.000 penduduk usia pendidikan tinggi                        |
| 2.         | Persentase Perpustakaan Dipersepsi ber-SNP            | 29,26%       | Terdapat 29,26% perpustakaan yang dipersepsi memenuhi standar nasional perpustakaan          |
| 3.         | Rasio Ketercukupan Koleksi Berdasarkan IFLA/UNESCO    | 0,0531       | Belum Memenuhi   |
| 4.         | Kekurangan Jumlah Koleksi Berdasarkan IFLA/UNESCO     | 9.706.614    | Kekurangan koleksi di PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT sebanyak 9.706.614                        |
| 5.         | Rasio Ketercukupan koleksi berdasarkan target Renstra | 1 : 9        | 1 judul koleksi dapat diakses oleh 9 penduduk  |
| 6.         | Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan                | 1: 17.317    | 1 tenaga perpustakaan melayani 17.317 penduduk   |
| 7.         | Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan                      | 1,68%        | Persentase jumlah kunjungan per hari dibagi per jumlah penduduk sebanyak 1,68%, belum ideal. |

|    |   |       |  |
|----|---|-------|--|
| 8. | Tingkat Keaktifan Kegiatan Sosialisasi & Pemanfaatan Perpustakaan | 0,88% | Keaktifan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemanfaatan perpustakaan sebanyak 0,88% |
| 9. | Tingkat Engagement Anggota Perpustakaan                           | 2,67% | Terdapat 2,67% penduduk yang merupakan anggota perpustakaan  |

#### 4. Indeks IPLM Tahun 2023 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 10 Kab./Kota. Hasil nilai IPLM pada perpustakaan Kab./Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 disajikan pada table rekapitulasi berikut.

**Tabel 2.3.5 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023**

| Kab./Kota                  | UPLM1         | UPLM2         | UPLM3         | UPLM4         | UPLM5         | UPLM6         | UPLM7         | SKOR IPLM    |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Kab. Lombok Barat          | 0,4207        | 0,1980        | 0,3460        | 0,0108        | 1,0000        | 0,2682        | 1,0000        | 46,34        |
| Kab. Lombok Tengah         | 0,2390        | 0,0444        | 0,4847        | 0,0336        | 0,1339        | 1,0000        | 1,0000        | 41,94        |
| Kab. Lombok Timur          | 0,2866        | 0,1398        | 0,4830        | 0,0328        | 1,0000        | 0,1661        | 1,0000        | 44,40        |
| Kab. Sumbawa               | 0,4498        | 0,3745        | 0,2890        | 0,2257        | 0,3920        | 1,0000        | 1,0000        | 53,30        |
| Kab. Dompu                 | 0,2621        | 0,1394        | 0,0834        | 0,9231        | 1,0000        | 0,3722        | 1,0000        | 54,00        |
| Kab. Bima                  | 0,3365        | 0,2053        | 0,1184        | 0,0068        | 1,0000        | 0,2169        | 1,0000        | 41,20        |
| Kab. Sumbawa Barat         | 0,5034        | 0,3885        | 1,0000        | 0,0501        | 1,0000        | 1,0000        | 1,0000        | 70,60        |
| Kab. Lombok Utara          | 0,3349        | 0,1167        | 1,0000        | 0,0614        | 0,7712        | 1,0000        | 1,0000        | 61,20        |
| Kota Mataram               | 0,8499        | 0,5105        | 1,0000        | 0,0325        | 0,4640        | 1,0000        | 1,0000        | 69,38        |
| Kota Bima                  | 0,5488        | 0,0673        | 1,0000        | 0,0740        | 0,8933        | 1,0000        | 1,0000        | 65,48        |
| <b>Nusa Tenggara Barat</b> | <b>0,3554</b> | <b>0,1971</b> | <b>1,0000</b> | <b>0,0898</b> | <b>1,0000</b> | <b>1,0000</b> | <b>1,0000</b> | <b>66,32</b> |

Berdasarkan tabel di atas pencapaian IPLM Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 66,32 dan masuk dalam kategori Sedang. Tiga Kab./Kota dengan pencapaian IPLM tertinggi Kab. Sumbawa Barat 70,60 Kota Mataram 69,38; dan Kota Bima 65,48. Sedangkan tiga Kab./Kota dengan pencapaian IPLM terendah yaitu Kab. Bima 41,20; Kab. Lombok Tengah 41,94; dan Kab. Lombok Timur 44,40.

Berikut sajian rincian data nilai IPLM Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 beserta interpretasinya.

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Jumlah Penduduk (BPS 2022)</b>          | <b>5.473.700</b> |
| <b>Jumlah Civitas Sekolah (BPS 2022)</b>   | <b>1.290.235</b> |
| <b>Jumlah Civitas Akademika (BPS 2022)</b> | <b>151.389</b>   |
| <b>Jumlah Kelembagaan (BPS 2022)</b>       | <b>9.079</b>     |

| NO.   | INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN                                   | NILAI                                  | INTERPRETASI   |
|---|--|--|--|
|   | <b>INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT</b>                  | <b>66,32</b>                           | <b>Sedang</b>  |
| 1.  | Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)                        | : 0,3554                               | Pencapaian layanan perpustakaan sebesar 36 persen dari standar                 |
| 2.  | Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2)                      | : 0,1971                               | Pencapaian koleksi perpustakaan sebesar 20 persen dari standar                 |
| 3.  | Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)                       | : 1,000                                | Pencapaian tenaga perpustakaan sebesar 100 persen dari standar                 |
| 4.  | Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari (UPLM4)                  | : 0,0898                               | Pencapaian tingkat kunjungan masyarakat sebesar 9 persen dari standar          |
| 5.  | Perpustakaan yang dibina Sesuai SNP (UPLM5)                    | : 1,000                                | Pencapaian perpustakaan yang dibina sesuai SNP sebesar 100 persen dari standar |
| 6.  | Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6) | : 1,000                                | Pencapaian keterlibatan masyarakat sebesar 100 persen dari standar             |
| 7.  | Anggota Perpustakaan (UPLM7)                                   | : 1,000                                | Pencapaian jumlah anggota perpustakaan sebesar 100 persen dari standar         |
| <b>Keterangan Standar:</b>                          |  |  |  |
| UPLM1: Jumlah kelembagaan                           |  | UPLM5: 22,39% dari jumlah perpustakaan |  |
| UPLM2: 2 x jumlah penduduk                          |  | UPLM6: 3% dari jumlah penduduk         |  |
| UPLM3: 1 tenaga perpustakaan melayani 2500 penduduk |  | UPLM7: 2% dari jumlah penduduk         |  |
| UPLM4: 2% dari jumlah penduduk                      |  |  |  |

| NO. | INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN                           | NILAI            | INTERPRETASI  |
|-----|--|------------------|---|
| 1.  | <b>Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)</b>         |                  |   |
|     | <b>Jumlah perpustakaan</b>                             | <b>3.264</b>     |   |
| a.  | Rasio ketersediaan perpustakaan umum                   | : 0,00004        | Terdapat 5 perpustakaan per 100.000 penduduk                              |
| b.  | Rasio ketersediaan perpustakaan sekolah                | : 0,00225        | Terdapat 226 perpustakaan per 100.000 civitas sekolah                     |
| c.  | Rasio ketersediaan perpustakaan Perguruan Tinggi       | : 0,00051        | Terdapat 51 perpustakaan per 100.000 civitas akademika                    |
| d.  | Kekurangan perpustakaan untuk memenuhi standar         | : 5.852          | Kekurangan perpustakaan sebanyak 5.852 unit                               |
| 2.  | <b>Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2)</b>       |                  |   |
|     | <b>Jumlah koleksi perpustakaan</b>                     | <b>2.157.509</b> |   |
| a.  | Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan                | : 1 : 3          | Setiap 1 koleksi dapat diakses oleh 3 penduduk                            |
| b.  | Kekurangan koleksi perpustakaan untuk memenuhi standar | : 8.789.891      | Kekurangan koleksi sebanyak 8.789.891 judul                               |
| 3.  | <b>Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)</b>        |                  |   |
|     | <b>Jumlah tenaga perpustakaan</b>                      | <b>3.341</b>     |   |
| a.  | Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan                 | : 1 : 1.639      | Setiap 1 pustakawan harus melayani 1.639 penduduk                         |
| b.  | Kekurangan tenaga perpustakaan untuk memenuhi standar  | : 0              | Jumlah tenaga perpustakaan sudah memenuhi standar dan perlu dipertahankan |

| NO.  | INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN | NILAI  | INTERPRETASI  |
|--|------------------------------|--------|---|
| <b>4. Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari (UPLM4)</b>                                      |                              |        |   |
| <b>Jumlah kunjungan masyarakat /hari :</b> 9.829   |                              |        |   |
| a. Persentase kunjungan masyarakat   | :                            | 0,18%  | Terdapat 5 perpustakaan per 100.000 penduduk  |
| b. Kekurangan kunjungan masyarakat per hari untuk memenuhi standar                           | :                            | 99,645 | Terdapat 226 perpustakaan per 100.000 civitas sekolah   |
| <b>5. Perpustakaan yang dibina Sesuai SNP (UPLM5)</b>  |                              |        |   |
| <b>Jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP :</b> 1.404                                    |                              |        |   |
| a. Persentase perpustakaan yang dibina sesuai SNP  | :                            | 43,51% | Terdapat 43,51 persen perpustakaan yang dibina sesuai SNP   |
| b. Kekurangan perpustakaan yang dibina sesuai SNP untuk memenuhi standar                     | :                            | 0      | Jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP sudah memenuhi standar dan perlu dipertahankan                     |
| <b>6. Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6)</b>                     |                              |        |   |
| <b>Jumlah keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan :</b> 235.454               |                              |        |   |
| a. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi dan pemanfaatan perpustakaan            | :                            | 4,30%  | Terdapat 4,3 persen masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi perpustakaan                                   |
| b. Kekurangan masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi perpustakaan untuk memenuhi standar | :                            | 0      | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi perpustakaan sudah memenuhi standar dan perlu dipertahankan |
| <b>7. Anggota Perpustakaan (UPLM7)</b>   |                              |        |   |
| <b>Jumlah anggota perpustakaan :</b> 934.188   |                              |        |   |
| a. Persentase anggota perpustakaan   | :                            | 17,07% | Terdapat 17,07 persen masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan  |
| b. Kekurangan anggota perpustakaan untuk memenuhi standar                                    | :                            | 0      | Jumlah anggota perpustakaan sudah memenuhi standar dan perlu dipertahankan                                    |

**Tabel 2.3.6 Data Kunjungan Pemustaka  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB**

| No.          | Jenis Layanan                   | Tahun         |               |               |               |
|--------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|              |                                 | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
| 1.           | UMUM                            | 11.129        | 18.195        | 36.090        | 37.738        |
| 2.           | Perpustakaan Keliling (Feeling) | 1.525         | 546           | 2.790         | 1.020         |
| 3.           | Layanan Internet                | 2.399         | 2.505         | 2.658         | 471           |
| 4.           | Kunjungan Berkelompok           | 126           | 467           | 1.015         | 3.087         |
| 5.           | Layanan Kearsipan               | 65            | 192           | 58            | 0             |
| 6.           | Layanan Deposit                 | 946           | 828           | 381           | 1.127         |
| 7.           | Pocadi IC NTB                   |               | 3.741         | 4.901         | 5.355         |
| 8.           | NTBeLib                         |               | 471           | 207           | 195           |
| 9.           | Storytelling                    |               |               |               | 711           |
| <b>TOTAL</b> |                                 | <b>16.190</b> | <b>26.945</b> | <b>48.100</b> | <b>49.704</b> |

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional perlu dilakukan pengawasan kearsipan secara nasional. Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan kearsipan dilakukan melalui kegiatan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Pengawasan kearsipan merupakan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara kearsipan nasional bersama daerah, yang dilakukan terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah.

Salah satu bentuk kinerja yang telah dilakukan Arsip Nasional bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui monitoring tindak lanjut dari hasil pengawasan kearsipan yang dilakukan pada tahun sebelumnya guna memenuhi Indeks Pengawasan Arsip Nasional melalui Laporan Hasil Pengawasan Arsip Nasional (LHPKN) tingkat daerah.

Adapun prioritas yang menjadi sasaran adalah pada ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya melalui pemenuhan 4 (empat) instrumen dasar yaitu: 1) Tata Naskah Dinas; 2) Klasifikasi Arsip; 3) Jadwal Retensi Arsip; dan 4) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. Selanjutnya dalam pengawasan kearsipan ditentukan tingkat perkembangan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh setiap daerah. Selanjutnya Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Kementerian/Lembaga/Daerah. Adapun tingkat perkembangan dibedakan menjadi 7 (tujuh) kategori yaitu:

1. Nilai diatas 90 s.d. 100 dengan kategori AA (sangat memuaskan);
2. Nilai diatas 80 s.d. 90 dengan kategori A (memuaskan);

3. Nilai diatas 70 s.d 80 dengan kategori BB (sangat baik);
4. Nilai diatas 60 s.d 70 dengan kategori B (baik);
5. Nilai diatas 50 s.d. 60 dengan kategori CC (cukup);
6. Nilai diatas 30 s.d. 50 dengan kategori C (kurang); dan
7. Nilai di atas 0 s.d 30 dengan kategori D (sangat kurang)

Hasil penilaian pengawasan kearsipan terhadap penyelenggaraan kearsipan penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022 sebagai berikut:

**Tabel 2.3.2 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat**

| No. | Nama Provinsi/Kab./Kota      | 2020  |                  | 2021  |                  | 2022  |          | 2023  |                          |
|-----|------------------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|----------|-------|--------------------------|
|     |                              | Nilai | Kategori         | Nilai | Kategori         | Nilai | Kategori | Nilai | Kategori                 |
| 1.  | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 43,69 | C (kurang)       | 62,94 | B (Baik)         | -     | B (Baik) | -     | BB (sangat baik)         |
| 2.  | Kota Mataram                 | 83,66 | A (memuaskan)    | -     | BB (sangat baik) | -     | -        | -     | A (memuaskan)            |
| 3.  | Kabupaten Lombok Barat       | 63,01 | B (baik)         | -     | BB (sangat baik) | -     | -        | -     | CC (cukup)               |
| 4.  | Kabupaten Lombok Tengah      | 56,97 | CC (cukup)       | -     | -                | -     | -        | -     | Tidak diberikan kategori |
| 5.  | Kabupaten Lombok Timur       | 41,87 | C (kurang)       | -     | -                | -     | -        | -     | Tidak diberikan kategori |
| 6.  | Kabupaten Lombok Utara       | 34,33 | C (kurang)       | -     | -                | -     | -        | -     | Tidak diberikan kategori |
| 7.  | Kabupaten Sumbawa Barat      | 83,66 | A (memuaskan)    | -     | -                | -     | -        | -     | B (baik)                 |
| 8.  | Kabupaten Sumbawa            | 70,19 | BB (sangat baik) | -     | -                | -     | -        | -     | Tidak diberikan kategori |
| 9.  | Kabupaten Dompu              | 38,68 | C (kurang)       | -     | -                | -     | -        | -     | Tidak diberikan kategori |
| 10. | Kabupaten Bima               | 38,56 | C (kurang)       | -     | -                | -     | -        | -     | Tidak diberikan kategori |
| 11. | Kota Bima                    | 50,55 | CC (cukup)       | -     | -                | -     | -        | -     | Tidak diberikan kategori |

Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik ini sangat di pengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama faktor internal merupakan peran yang sangat berpengaruh secara langsung terhadap praktek penyelenggaraan pelayanan seperti kepemimpinan yang efektif, kualitas sumber daya manusia, dan budaya birokrasi serta sistem insentif. Kemudian yang Kedua, bagaimana lingkungan eksternal organisasi tersebut, seperti budaya dan kondisi masyarakat, ikut mempengaruhi kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB segera melakukan

langkah-langkah kebijakan singkronisasi dan koordinasi pengembangan perpustakaan dan karsipan terkait pelayanan Perangkat Daerah dengan rencana pembangunan, pengembangan dan peningkatan fasilitas perpustakaan dan karsipan di kabupaten/kota, desa/kelurahan, komunitas, sekolah menengah/khusus.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi NTB periode 2021-2023, meliputi pelayanan administrasi perkantoran, ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana, pembinaan kapasitas sumber daya aparatur, jumlah pelaporan kinerja, manajemen asset, jumlah pengunjung perpustakaan pertahun, peningkatan perbaikan sistem administrasi karsipan, jumlah arsip yang terselamatkan dibagi total arsip yang tersimpan di depo, pemeliharaan sarana/prasarana karsipan, peningkatan kualitas SDM layanan informasi, dan peningkatan record center OPD, dengan rasio kinerja 100%. Namun pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan mengalami perubahan pada dasar hukum yang merupakan dasar dalam pelaksanaannya. Berikut adalah capaian kinerja tahun 2021-2023:

**Tabel 2.3.1 Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB  
Tahun 2021-2023**

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                        | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- |      |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun ke- |      |        |        |      | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |      |
|-----|---|-------------|------------|--------------------------|---|------|------|------|------|-----------------------------|------|--------|--------|------|------------------------------|------|------|------|------|
|     |   |             |            |                          | 2019                                      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019                        | 2020 | 2021   | 2022   | 2023 | 2019                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1.  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah  | -           | -          |                          |   |      | BB   | BB   | BB   |                             |      | BB     | BB     | BB   |                              |      | 100% | 100% | 100% |
| 2.  | Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | -           | -          |                          |   | 100% | 100% | 100% |      |                             | 100% | 99,62% | 100%   |      |                              | 100% | 100% | 100% |      |
| 3.  | Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian KCCR dan Naskah Kuno Milik Daerah       | -           | -          |                          |   | 100% | 100% | 100% |      |                             | 100% | 94,95% | 98,17% |      |                              | 100% | 100% | 100% |      |
| 4.  | Persentase Peningkatan Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis          | -           | -          |                          |   | 100% | 100% | 100% |      |                             | 100% | 99,66% | 100%   |      |                              | 100% | 100% | 100% |      |
| 5.  | Persentase Peningkatan Jumlah Arsip yang Terselamatkan                            | -           | -          |                          |   | 100% | 100% | 100% |      |                             | 100% | 100%   | 100%   |      |                              | 100% | 100% | 100% |      |

**Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2023**

| Program  | Anggaran pada Tahun ke- |      |                   |                   |                | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |      |                   |                   |                | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |      |        |        |        | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|--|-------------------------|------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|------|-------------------|-------------------|----------------|---|------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------|
|  | 2019                    | 2020 | 2021              | 2022              | 2023           | 2019                              | 2020 | 2021              | 2022              | 2023           | 2019  | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | Anggaran              | Realisasi |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah         |                         |      | 13.662.151.614,00 | 13.898.112.489,00 | 14.225.847.824 |                                   |      | 13.192.253.995,00 | 12.766.288.669,00 | 12.918.925.295 |   |      | 96,56% | 91,86% | 90,81% |                       |           |
| Program Pembinaan Perpustakaan                       |                         |      | 1.037.249.000,00  | 16.004.223.850,00 | 929.324.211    |                                   |      | 1.028.850.100,00  | 15.942.682.550,00 | 867.858.611    |   |      | 99,19% | 99,62% | 93,39% |                       |           |
| Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno |                         |      | 4.675.400,00      | 63.807.000,00     | 53.118.200     |                                   |      | 4.675.400,00      | 60.587.500,00     | 52.268.500     |   |      | 100%   | 94,95% | 98,40% |                       |           |
| Program Pengelolaan Arsip                            |                         |      | 52.029.800,00     | 125.778.600,00    | 170.051.700    |                                   |      | 51.805.600,00     | 125.350.800,00    | 151.224.486    |   |      | 99,57% | 99,66% | 88,93  |                       |           |
| Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip          |                         |      | 1.146.200,00      | 9.409.400,00      | 27.637.500     |                                   |      | 1.146.000,00      | 9.409.400,00      | 26.888.860     |   |      | 99,98% | 100%   | 97,29% |                       |           |

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi NTB**

Perkembangan dunia digital dapat menimbulkan dua sisi yang berlawanan dalam kaitannya dengan pengembangan literasi. Berkembangnya peralatan digital dan akses akan informasi dalam bentuk digital mempunyai tantangan sekaligus peluang. Dalam menghadapi tantangan dan peluang tersebut Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi NTB memiliki peran sentral sebagai lembaga penyedia informasi dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang sehat dan cerdas.

Dengan memperhatikan kondisi saat ini, Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi NTB dalam melakukan penyelenggaraan pembangunan masyarakat dirasa masih belum optimal antara lain pembinaan perpustakaan berbasis literasi yang belum optimal, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno daerah yang masih kurang disebabkan pemahaman masyarakat dan penerbit tentang Undang- undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam masih kurang, pengelolaan arsip serta perlindungan dan penyelamatan arsip yang belum maksimal.

Pembangunan masyarakat sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis dilingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi NTB.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan kepada Pemerintah Daerah, diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah periode 2024-2026.

Analisis lingkungan eksternal menjadi perhatian untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi NTB. Beberapa tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi NTB pada periode 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Semakin berkembangnya informasi digital di internet;

2. Kebutuhan masyarakat akan informasi semakin meningkat;
3. Jangkauan layanan perpustakaan dan kearsipan yang masih belum maksimal untuk daerah terpencil;
4. Kurangnya kesadaran minat dan budaya baca di masyarakat; dan
5. Kesadaran tentang arsip di tingkat masyarakat, swasta dan pemerintah daerah yang masih kurang.

Berikut beberapa peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB pada periode 2024-2026, adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya aplikasi layanan berbasis digital bagi pemustaka secara daring (*online*) melalui aplikasi iDeposit, Srikandi, JIKN dan NTBelib;
- b. Kemudahan masyarakat dalam mengakses koleksi dan arsip berbasis digital secara daring (*online*);
- c. Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat;
- d. Meningkatnya kesadaran tentang arsip di tingkat masyarakat, swasta dan pemerintah daerah; dan
- e. Adanya regulasi yang mengatur urusan bidang perpustakaan dan kearsipan.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI NTB**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB sebagai salah satu lembaga penyedia, pengelola informasi dan pengembangan karsipan harus bisa menyediakan informasi yang diperlukan oleh para penggunanya, baik yang tersedia diperpustakaan dan karsipan secara fisik maupun yang bisa diakses via internet. Berdasarkan hal tersebut, kondisi ideal Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi NTB yang diharapkan meliputi:

1. Meningkatnya kompetensi SDM;
2. Tersedianya kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perpustakaan dan karsipan;
3. Optimalnya pelaksanaan pembinaan perpustakaan berbasis literasi;
4. Tersedianya koleksi digital dan aplikasi penunjang pelayanan koleksi digital;
5. Terselamatkannya arsip daerah.

Peran Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi NTB dalam pembangunan daerah tahun 2024-2026 adalah meningkatkan pembangunan masyarakat melalui upaya pembinaan perpustakaan di masyarakat dan sekolah menengah atas, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno daerah, pengelolaan arsip baik dinamis maupun statis serta perlindungan dan penyelamatan arsip secara berdaya guna dan berhasil guna, dengan mengutamakan upaya pemanfaatan koleksi perpustakaan dan arsip berbasis digital (literasi) melalui daring (*online*).

Identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang perpustakaan dan karsipan di Provinsi NTB sangat perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran dan pemetaan atas kondisi real yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Karsipan Daerah Provinsi NTB dalam melakukan pengembangan dan pembinaan bidang perpustakaan dan karsipan. Dengan memperhatikan dan menganalisis secara mendalam kondisi lingkungan internal dan eksternal yang

begitu dinamis, dapat diidentifikasi dan dirumuskan permasalahan yang menjadi isu sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah dalam pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan di Provinsi NTB sebagai berikut:

1. Sarana dan prasana yang dirasa masih kurang memadai;
2. Pemanfaatan teknologi belum maksimal;
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia belum maksimal; dan
4. Belum optimalnya aplikasi berbasis digital yang dilayankan secara daring (*online*).

### **3.2 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga, Kabupaten/ Kota**

Berdasarkan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024 maka Visi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disesuaikan dengan Visi Presiden periode 2020-2024 adalah "**Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi**".

Selanjutnya Misi Perpustakaan Nasional disesuaikan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu agenda ke-4 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Maka Perpustakaan Nasional merumuskan Misi:

**"Meningkatkan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, Pelayanan Prima Perpustakaan, dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Nusantara".**

Berdasarkan Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2020-2024, maka Visi ANRI adalah "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**".

Misi Arsip Nasional (ANRI) sebagai berikut:

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;

4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Berdasarkan Renstra Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota **Mataram Tahun 2016-2021**, maka visi **“Terwujudnya pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan sebagai informasi terdepan guna mencerdaskan masyarakat.”**. Dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran aparatur terhadap pentingnya arsip melalui program sosialisasi kearsipan;
2. Meningkatkan pengembangan system kearsipan melalui pelayanan prima;
3. Melestarikan arsip dan bahan pustaka yang memiliki nilai-nilai agama dan budaya daerah;
4. Memanfaatkan dan meningkatkan koleksi arsip daerah dan bahan pustaka sebagai sumber informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Meningkatkan profesionalisme pelayanan dan pengelolaan perpustakaan;
6. Menggelorakan semangat minat baca dalam rangka peningkatan sumber daya manusia; dan
7. Mengembangkan kerjasama, koordinasi dan kemitraan.

Berdasarkan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019. Visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat **“Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Amanah, Sejahtera dan Berprestasi dengan Dilandasi Nilai Patut, Patuh, Patju (LOBAR MANTAP)”**. Dengan misi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Melayani serta Berbasis Transparansi, Akuntabilitas yang Efisien dan Memiliki Integritas”.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB pada Rancangan Awal Renstra bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat ataupun faktor

pendorong dari pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam perumusan isu-isu strategis. Berikut adalah faktor-faktor penghambat dan pendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB dengan memperhatikan renstra K/L, berikut adalah faktor penghambat dan pendorong pelayanan perpustakaan dan karsipan:

Faktor penghambat, antara lain:

- Tingkat ketercukupan Koleksi yang masih kurang memadai baik koleksi digital dan konvensional;
- Tingkat Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dan arsiparis dirasa masih kurang;
- Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan/Pemustaka dan Kearsipan belum optimal; dan
- Terbatasnya sarana prasarana perpustakaan yang masih kurang.

Faktor Pendorong, antara lain:

- Ketersediaan koleksi konvensional dan digital melalui pengadaan koleksi perpustakaan dan alih media koleksi perpustakaan dan alih media arsip;
- Kemudahan masyarakat dalam mengakses koleksi dan arsip berbasis digital secara daring (*online*);
- Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat, melalui promosi perpustakaan dan ketersediaan kegiatan lomba tingkat TK, Sekolah dan Perguruan Tinggi;
- Meningkatkan kesadaran tentang arsip di tingkat masyarakat, swasta dan pemerintah daerah, melalui pembinaan perpustakaan dan pembinaan karsipan; dan
- Ketersediaan regulasi yang mengatur urusan bidang perpustakaan dan karsipan.

### **3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029.

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemasaran dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Strategi pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan strategis provinsi meliputi:

1. Mengembangkan sarana prasarana sesuai kebutuhan pengembangan kawasan;
2. Meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana; dan
3. Mengembangkan sarana prasarana secara terpadu dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan sarana dan prasarana pelayanan publik, isu yang harus menjadi perhatian bukan sekedar pencapaiannya saja, namun masih banyak hal lain yang sangat memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah bahwa sebagai pengembang tugas pelayanan Perpustakaan dan Arsip berupaya peningkatan minat baca masyarakat berbasis literasi dan penyelamatan arsip daerah.

Memperhatikan tingkat persebaran penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai daerah pariwisata dengan memperhatikan kualitas lingkungan dengan pengembangan ruang terbuka hijau maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan harus dapat memberikan pelayanan yang maksimal dengan memanfaatkan ruang terbuka hijau sebagai Taman Baca Masyarakat guna peningkatan minat baca sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat melalui layanan gelar baca buku santai yang dilaksanakan pada hari minggu dan pelayanan arsip keliling.

### **3.4 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya.

Proses perumusan isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi menuju kualitas kondusifitas daerah menuju *democratic governance*. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB melalui pengembangan minat dan budaya baca berbasis literasi serta pengolahan dan pelestarian arsip dituntut lebih humanis, antisipatif, responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional yang berdampak pada kondusifitas daerah. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Dalam upaya menata dan mengembangkan perpustakaan dan arsip dalam waktu 5 tahun kedepan, berdasarkan hal tersebut isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, sebagai berikut:

a. Bidang urusan Perpustakaan

- Masih kurangnya Sarana Prasarana pendukung peningkatan minat dan daya baca masyarakat, terutama mobil Perpustakaan Keliling untuk menjangkau wilayah wilayah pelosok di Provinsi NTB;
- Masih kurangnya Koleksi bahan bacaan yang tersedia dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada;
- Belum terwujudnya jumlah dan kapasitas perpustakaan yang memadai, terutama perpustakaan Desa, dimana berdasarkan data dari Kemendes & PDT, dari 1005 Desa/Kelurahan yang ada di NTB, baru 688 Desa yang memiliki Perpustakaan Desa; dan
- Masih minimnya dukungan untuk Pengembangan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

b. Bidang urusan Kearsipan

- Belum optimalnya sistem administrasi karsipan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas;
- Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; dan
- Belum terwujudnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh perangkat daerah. Selanjutnya sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam upaya mendukung Rencana Pembangunan Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan perlu merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026. Terdapat 2 (dua) Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB berdasarkan pada Tujuan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu **"Terwujudnya Peningkatan Kualitas Manusia Yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (Kuat) dengan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)"** dan Sasaran RPD **"Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT) dengan indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)"**. Selanjutnya tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB dalam mendukung tercapainya tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), yaitu Tujuan 1) Terwujudnya pembangunan literasi masyarakat; 2) Terwujudnya Tertib Arsip Dalam Penyelenggaraan Kearsipan pada Pemerintah Provinsi NTB, dengan 2 sasaran yaitu 1) Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan dan 2) Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib.

Berdasarkan hal tersebut merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis dan sarana untuk melakukan evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Awal Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2024-2026, sebagaimana tertuang pada table 4.1.1.

**Tabel 4.1.1**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB**  
**Tahun 2024-2026**

| No. | Tujuan   | Sasaran   | Indikator Tujuan/Sasaran  | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke- |           |           | Keterangan   |
|-----|--|---|---|--|-----------|-----------|--|
|     |  |   |   | 2024   | 2025      | 2026      |  |
| 1.  | <b>Terwujudnya pembangunan literasi masyarakat</b>   |   | <b>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat</b>   | <b>68,5</b>                                  | <b>69</b> | <b>70</b> | <b>Formulasi:</b><br>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang dirilis oleh Perpustakaan Nasional RI setiap tahun  |
|     |  | Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan                       | Angka Kunjungan Pemustaka   | 52.900                                       | 58.200    | 64.000    | <b>Formulasi</b><br>Jumlah kunjungan pemustaka (Orang) yang datang berkunjung ke perpustakaan setiap tahun   |
|     |  |   | Persentase Jangkauan Layanan Perpustakaan Mobile ke Desa  | 20   | 25        | 30        | <b>Formulasi</b><br>Jumlah desa/ kelurahan yang dikunjungi perpustakaan keliling setiap tahun dibagi jumlah seluruh desa/ kelurahan di provinsi NTB x 100%                   |
| 2.  | <b>Terwujudnya Tertib Arsip Dalam Penyelenggaraan Kearsipan pada Pemerintah Provinsi NTB</b> |   | <b>Persentase Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota dengan Nilai Pengawasan Kearsipan B Ke Atas</b> | <b>40</b>                                    | <b>45</b> | <b>50</b> | <b>Formulasi</b><br>Jumlah Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota dengan Nilai Pengawasan Kearsipan B Ke Atas dibagi Jumlah seluruh Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota dibagi 100% |
|     |  | Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib | Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib                                  | 45   | 50        | 55        | <b>Formulasi</b><br>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Mengelola Arsip Secara Tertib dibagi jumlah seluruh Perangkat daerah yang ada dikali 100%                             |
|     |  |   | Persentase Arsip yang Terselamatkan   | 100  | 100       | 100       | <b>Formulasi</b><br>Jumlah arsip yang terselamatkan di bagi jumlah arsip yang ada di kali 100%   |

## **4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah**

*Cascading* (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level perencanaan yang lebih tinggi hingga level yang lebih rendah/detil.

Sesuai amanat Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022, dokumen Rencana Pembangunan Daerah harus memuat *cascading* kinerja mulai dari tujuan sampai dengan *outcome* hingga indikator masing-masing kinerja. Berikut adalah *table cascading* kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB.

**Tabel 4.2.1 Cascading Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat**  
**Tahun 2024-2026**

| Tujuan  | Indikator Tujuan   | Satuan | Baseline 2022 | Target |      |      | Sasaran   | Indikator Sasaran   | Satuan | Baseline 2022 | Target |        |        | Perangkat Daerah Pendukung | Program Pembangunan  |
|---|--|--------|---------------|--------|------|------|---|---|--------|---------------|--------|--------|--------|----------------------------|--|
|   |  |        |               | 2024   | 2025 | 2026 |   |   |        |               | 2024   | 2025   | 2026   |                            |  |
| 1   | 2  | 3      | 4             | 5      | 6    | 7    | 8   | 9   | 10     | 11            | 12     | 13     | 14     | 15                         | 16   |
| Terwujudnya pembangunan literasi masyarakat   | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat   | Nilai  | -             | 68,5   | 69   | 70   | Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan                       | Angka Kunjungan Pemustaka                                       | Orang  | 48.100        | 52.900 | 58.200 | 64.000 |                            | 1. Program Pembinaan Perpustakaan dan<br>2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno |
| Terwujudnya Tertib Arsip Dalam Penyelenggaraan Kearsipan pada Pemerintah Provinsi NTB | Persentase Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota dengan Nilai Pengawasan Kearsipan B Ke Atas | %      | 30            | 40     | 45   | 50   | Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib | Persentase Pengelolaan Arsip yang Mengelola Arsip Secara Tertib | %      | 35            | 45     | 50     | 55     |                            | 1. Program Pengelolaan Arsip dan<br>2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip               |

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun dan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya, diperlukan pedoman berupa arah kebijakan.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan dalam lingkup provinsi, maupun dalam lingkup organisasi internalnya. Sebagai perangkat daerah yang melayankan informasi dalam bentuk buku maupun digital serta pengolahan arsip daerah bertugas menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penyelaras, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi, serta penyediaan data untuk pengembangan minat dan budaya baca berbasis digital dan pengolahan arsip daerah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta dengan mencermati isu-isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, maka strategi dan kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 sebagaimana table 5.1.1, sebagai berikut.

**Tabel 5.1.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

| <b>Tujuan</b>   | <b>Sasaran</b>  | <b>Strategi</b>   | <b>Arah Kebijakan</b>  |
|---|---|---|--|
| Terwujudnya Literasi Membaca Masyarakat   | Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan                       | Meningkatkan gerakan sosial literasi ( <i>influencer</i> ), pegiat literasi, penguatan sistem informasi perpustakaan yang terpadu | Peningkatan akses layanan perpustakaan dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter |
| Terwujudnya Tertib Arsip Dalam Penyelenggaraan Kearsipan pada Pemerintah Provinsi NTB | Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib | Meningkatkan pengawasan arsip daerah  | Peningkatan ketersediaan arsip daerah  |

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana program ditetapkan rencana capaian kinerja, terutama untuk Sasaran Program (*outcome*) dan sasaran kegiatan (*output*) dimana penyusunan program dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pembinaan Perpustakaan;
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
4. Program Pengelolaan Arsip; dan
5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB periode Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1.1, sebagai berikut :

**Tabel 6.1.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024-2026**

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)                           | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                |        |    |        |    | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab                | Lokasi         |          |              |
|--------|---------|-------------------|---|--|--|---|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--------|----|--------|----|---|----------------|----------|--------------|
|        |         |                   |   |  |  | 2024  |                | 2025       |                | 2026       |                | 2027   |    | 2028   |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                |          |              |
|        |         |                   |   |  |  | Target  | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target | Rp | Target | Rp | Target  | Rp             |          |              |
|        |         | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |  | 100%  | 26.396.586.454 | 100%       | 24.172.182.496 | 100%       | 24.935.282.340 |        |    |        |    | 100%  | 75.504.051.290 | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.2.24         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                 |  |  | 100%  | 26.396.586.454 | 100%       | 24.172.182.496 | 100%       | 24.935.282.340 |        |    |        |    | 100%  | 75.504.051.290 | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah   |  | BB  | 17.174.600.854 | BB         | 17.427.696.896 | BB         | 18.167.171.740 |        |    |        |    | BB  | 52.769.469.490 | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.01      | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Jumlah Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun                        |  | 10 Dokumen                                    | 163.000.000    | 10 Dokumen | 163.000.000    | 10 Dokumen | 163.000.000    |        |    |        |    | 10 Dokumen  | 489.000.000    | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  | 1 Dokumen                                     | 45.000.000     | 1 Dokumen  | 45.000.000     | 1 Dokumen  | 45.000.000     |        |    |        |    | 1 Dokumen   | 135.000.000    | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     |  | 1 Dokumen                                     | 20.000.000     | 1 Dokumen  | 20.000.000     | 1 Dokumen  | 20.000.000     |        |    |        |    | 1 Dokumen   | 60.000.000     | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |  | 1 Dokumen                                     | 18.000.000     | 1 Dokumen  | 18.000.000     | 1 Dokumen  | 18.000.000     |        |    |        |    | 1 Dokumen   | 54.000.000     | DPKP NTB | Kota Mataram |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)   | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |                 |                |                 |                |        |    |        |    | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab                | Lokasi          |                |              |              |
|--------|---------|-------------------|---|--|--|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--------|----|--------|----|---|-----------------|----------------|--------------|--------------|
|        |         |                   |   |  |  | 2024  |                | 2025            |                | 2026            |                | 2027   |    | 2028   |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                 |                |              |              |
|        |         |                   |   |  |  | Target  | Rp             | Target          | Rp             | Target          | Rp             | Target | Rp | Target | Rp | Target  | Rp              |                |              |              |
|        |         | 2.23.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |  | 1 Dokumen                                     | 15.000.000     | 1 Dokumen       | 15.000.000     | 1 Dokumen       | 15.000.000     |        |    |        |    | 1 Dokumen   | 45.000.000      | DPKP NTB       | Kota Mataram |              |
|        |         | 2.23.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |  | 1 Dokumen                                     | 15.000.000     | 1 Dokumen       | 15.000.000     | 1 Dokumen       | 15.000.000     |        |    |        |    | 1 Dokumen   | 45.000.000      | DPKP NTB       | Kota Mataram |              |
|        |         | 2.23.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  | 5 Laporan                                     | 20.000.000     | 5 Laporan       | 20.000.000     | 5 Laporan       | 20.000.000     |        |    |        |    | 5 Laporan   | 60.000.000      | DPKP NTB       | Kota Mataram |              |
|        |         | 2.23.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  | 4 Laporan                                     | 30.000.000     | 4 Laporan       | 30.000.000     | 4 Laporan       | 30.000.000     |        |    |        |    | 4 Laporan   | 90.000.000      | DPKP NTB       | Kota Mataram |              |
|        |         | 2.23.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   |  | 100%  | 13.887.520.854 | 100%            | 14.575.496.896 | 100%            | 15.297.871.740 |        |    |        |    |   | 100%            | 43.760.889.490 | DPKP NTB     | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |  | 95 Orang/Bulan                                | 13.759.520.854 | 100 Orang/Bulan | 14.447.496.896 | 105 Orang/Bulan | 15.169.871.740 |        |    |        |    |   | 105 Orang/Bulan | 43.376.889.490 | DPKP NTB     | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  | 4 Dokumen                                     | 70.000.000     | 4 Dokumen       | 315.000.000    | 4 Dokumen       | 330.750.000    |        |    |        |    |   | 4 Dokumen       | 210.000.000    | DPKP NTB     | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |  | 1 Dokumen                                     | 8.000.000      | 1 Dokumen       | 52.500.000     | 1 Dokumen       | 55.125.000     |        |    |        |    |   | 1 Dokumen       | 24.000.000     | DPKP NTB     | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |  | 2 Dokumen                                     | 7.000.000      | 2 Dokumen       | 15.750.000     | 2 Dokumen       | 16.537.500     |        |    |        |    |   | 2 Dokumen       | 21.000.000     | DPKP NTB     | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   |  | 1 Laporan                                     | 13.000.000     | 1 Laporan       | 26.250.000     | 1 Laporan       | 27.562.500     |        |    |        |    |   | 1 Laporan       | 39.000.000     | DPKP NTB     | Kota Mataram |

| Tujuan | Sasaran | Kode                | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)   | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |              |                   |              |                   |        |    |        |    | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi            |          |              |
|--------|---------|---------------------|---|--|--|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------|----|--------|----|--|-------------------|----------|--------------|
|        |         |                     |   |  |  | 2024  |                   | 2025         |                   | 2026         |                   | 2027   |    | 2028   |    |  |                   |          |              |
|        |         |                     |   |  |  | Target  | Rp                | Target       | Rp                | Target       | Rp                | Target | Rp | Target | Rp |  |                   |          |              |
|        |         | 2.23.01.1.02.0006   | Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan                       | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |  | 1 Dokumen                                     | 10.000.000        | 1 Dokumen    | 10.000.000        | 1 Dokumen    | 10.000.000        |        |    |        |    | 1 Dokumen                                    | 30.000.000        | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD |  | 10 Laporan                                    | 10.000.000        | 10 Laporan   | 10.000.000        | 10 Laporan   | 10.000.000        |        |    |        |    | 10 Laporan                                   | 30.000.000        | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.02.0008   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran              | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |  | 2 Dokumen                                     | 10.000.000        | 2 Dokumen    | 10.000.000        | 2 Dokumen    | 10.000.000        |        |    |        |    | 2 Dokumen                                    | 30.000.000        | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | <b>2.23.01.1.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>               | <b>Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah</b>   |  | <b>100 %</b>                                  | <b>31.000.000</b> | <b>100 %</b> | <b>31.000.000</b> | <b>100 %</b> | <b>31.000.000</b> |        |    |        |    | <b>100 %</b>                                 | <b>93.000.000</b> | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.03.0001   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |  | 1 Dokumen                                     | 500.000           | 1 Dokumen    | 500.000           | 1 Dokumen    | 500.000           |        |    |        |    | 1 Dokumen                                    | 1.500.000         | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.03.0002   | Pengamanan Barang Milik Daerah  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  | 1 Dokumen                                     | 5.000.000         | 1 Dokumen    | 5.000.000         | 1 Dokumen    | 5.000.000         | -      | -  |        |    | 1 Dokumen                                    | 15.000.000        | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.03.0003   | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                           | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                   |  | 1 Laporan                                     | 1.500.000         | 1 Laporan    | 1.500.000         | 1 Laporan    | 1.500.000         |        |    |        |    | 1 Laporan                                    | 4.500.000         | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.03.0004   | Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah                  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD   |  | 2 Laporan                                     | 500.000           | 2 Laporan    | 500.000           | 2 Laporan    | 500.000           | -      | -  | -      | -  | 2 Laporan                                    | 1.500.000         | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.03.0005   | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD           | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   |  | 2 Laporan                                     | 500.000           | 2 Laporan    | 500.000           | 2 Laporan    | 500.000           |        |    |        |    | 2 Laporan                                    | 1.500.000         | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.03.0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                 | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |  | 2 Laporan                                     | 21.000.000        | 2 Laporan    | 21.000.000        | 2 Laporan    | 21.000.000        |        |    |        |    | 2 Laporan                                    | 63.000.000        | DPKP NTB | Kota Mataram |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)                       | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |           |            |           |            |        |    |        |    | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab                | Lokasi      |          |              |
|--------|---------|-----------------|---|--|--|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|----|--------|----|---|-------------|----------|--------------|
|        |         |                 |   |  |  | 2024  |            | 2025      |            | 2026      |            | 2027   |    | 2028   |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |             |          |              |
|        |         |                 |   |  |  | Target  | Rp         | Target    | Rp         | Target    | Rp         | Target | Rp | Target | Rp | Target  | Rp          |          |              |
|        |         | 2.23.01.10.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |  | 1 Dokumen                                     | 2.000.000  | 1 Dokumen | 2.000.000  | 1 Dokumen | 2.000.000  |        |    |        |    | 1 Dokumen   | 6.000.000   |          |              |
|        |         | 2.23.01.10.04   | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun                               |  | -   | -          | -         | -          | -         | -          | -      | -  | -      | -  | -   | -           | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.10.0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi   | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah  |  | -   | -          | -         | -          | -         | -          | -      | -  | -      | -  | -   | -           | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.10.0002 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah  | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah |  | -   | -          | -         | -          | -         | -          | -      | -  | -      | -  | -   | -           | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.10.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah                    |  | -   | -          | -         | -          | -         | -          | -      | -  | -      | -  | -   | -           | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.10.0004 | Pendaatan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (Sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran) | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah   |  | -   | -          | -         | -          | -         | -          | -      | -  | -      | -  | -   | -           | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.10.0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah (Sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)                 | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah               |  | -   | -          | -         | -          | -         | -          | -      | -  | -      | -  | -   | -           | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.10.0006 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah (Sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)                 | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah  |  | -   | -          | -         | -          | -         | -          | -      | -  | -      | -  | -   | -           | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.10.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah  | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah  |  | -   | -          | -         | -          | -         | -          | -      | -  | -      | -  | -   | -           | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.10.05   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah                                  |  | 2 Dokumen                                     | 80.080.000 | 2 Dokumen | 86.200.000 | 2 Dokumen | 92.300.000 |        |    |        |    | 2 Dokumen   | 258.580.000 | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.10.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai   | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                    |  | 5 Unit  | 15.000.000 | 5 Unit    | 15.000.000 | 5 Unit    | 15.000.000 |        |    |        |    | 5 Unit  | 45.000.000  | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.10.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan   |  | 95 Paket                                      | 45.000.000 | 100 Paket | 50.000.000 | 105 Paket | 55.000.000 | -      | -  | -      | -  | 105 Paket   | 150.000.000 | DPKP NTB | Kota Mataram |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)             | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |           |             |           |             |        |    |        |    | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab                | Lokasi        |          |              |              |
|--------|---------|-------------------|--|--|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------|----|--------|----|---|---------------|----------|--------------|--------------|
|        |         |                   |  |  |  | 2024  |             | 2025      |             | 2026      |             | 2027   |    | 2028   |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |               |          |              |              |
|        |         |                   |  |  |  | Target  | Rp          | Target    | Rp          | Target    | Rp          | Target | Rp | Target | Rp | Target  | Rp            |          |              |              |
|        |         | 2.23.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       |  | 2 Dokumen                                     | 18.000.000  | 2 Dokumen | 18.900.000  | 2 Dokumen | 19.800.000  |        |    |        |    | 2 Dokumen   | 56.700.000    | DPKP NTB | Kota Mataram |              |
|        |         | 2.23.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian           |  | 2 Dokumen                                     | 1.083,000   | 2 Dokumen | 1.300.000   | 2 Dokumen | 1.500.000   |        |    |        |    | 2 Dokumen   | 3.880.000     | DPKP NTB | Kota Mataram |              |
|        |         | 2.23.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai               | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     |  | 1 Dokumen                                     | 1.000.000   | 1 Dokumen | 1.000.000   | 1 Dokumen | 1.000.000   |        |    |        |    | 1 Dokumen   | 3.000.000     | DPKP NTB | Kota Mataram |              |
|        |         | 2.23.01.1.05.0006 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun                                  | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan  |  | -   | -           | -         | -           | -         | -           | -      | -  | -      | -  | -   | -             | -        | DPKP NTB     | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.05.0007 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas       | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas        |  | -   | -           | -         | -           | -         | -           | -      | -  | -      | -  | -   | -             | -        | DPKP NTB     | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.05.0008 | Pemindahan Tugas ASN   | Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan   |  | -   | -           | -         | -           | -         | -           | -      | -  | -      | -  | -   | -             | -        | DPKP NTB     | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    |  | -   | -           | -         | -           | -         | -           | -      | -  | -      | -  | -   | -             | -        | DPKP NTB     | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   |  | -   | -           | -         | -           | -         | -           | -      | -  | -      | -  | -   | -             | -        | DPKP NTB     | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |  | -   | -           | -         | -           | -         | -           | -      | -  | -      | -  | -   | -             | -        | DPKP NTB     | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah                                   |  | 100%  | 358.000.000 | 100%      | 362.000.000 | 100%      | 368.000.000 |        |    |        |    | 100%  | 1.088.000.000 | DPKP NTB | Kota Mataram |              |
|        |         | 2.23.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |  | 11 Paket                                      | 25.000.000  | 11 Paket  | 27.000.000  | 11 Paket  | 30.000.000  |        |    |        |    | 11 Paket  | 82.000.000    | DPKP NTB | Kota Mataram |              |
|        |         | 2.23.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |  | 15 Paket                                      | 45.000.000  | 20 Paket  | 47.000.000  | 25 Paket  | 50.000.000  |        |    |        |    | 25 Paket  | 142.000.000   | DPKP NTB | Kota Mataram |              |
|        |         | 2.23.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    |  | -   | -           | -         | -           | -         | -           | -      | -  | -      | -  | -   | -             | -        | DPKP NTB     | Kota Mataram |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)            | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |             |             |             |             |        |    |        |    | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab                | Lokasi        |          |              |              |
|--------|---------|-------------------|--|---|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|----|--------|----|---|---------------|----------|--------------|--------------|
|        |         |                   |  |   |  | 2024  |               | 2025        |             | 2026        |             | 2027   |    | 2028   |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |               |          |              |              |
|        |         |                   |  |   |  | Target  | Rp            | Target      | Rp          | Target      | Rp          | Target | Rp | Target | Rp | Target  | Rp            |          |              |              |
|        |         | 2.23.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    |  | 15 Paket                                      | 20.000.000    | 15 Paket    | 20.000.000  | 15 Paket    | 20.000.000  |        |    |        |    | 15 Paket  | 60.000.000    | DPKP NTB | Kota Mataram |              |
|        |         | 2.23.01.1.06.0005 | Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan                               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                           |  | 2 Paket                                       | 15.000.000    | 2 Paket     | 15.000.000  | 2 Paket     | 15.000.000  |        |    |        |    | 2 Paket   | 45.000.000    | DPKP NTB | Kota Mataram |              |
|        |         | 2.23.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          |  | 120 Dokumen                                   | 18.000.000    | 120 Dokumen | 18.000.000  | 120 Dokumen | 18.000.000  |        |    |        |    | 120 Dokumen   | 54.000.000    | DPKP NTB | Kota Mataram |              |
|        |         | 2.23.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan   |  | -   | -             | -           | -           | -           | -           | -      | -  | -      | -  | -   | -             | -        | DPKP NTB     | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  | 1 Laporan                                     | 15.000.000    | 1 Laporan   | 15.000.000  | 1 Laporan   | 15.000.000  |        |    |        |    | 1 Laporan   | 45.000.000    | DPKP NTB | Kota Mataram |              |
|        |         | 2.23.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |  | 1 Laporan                                     | 200.000.000   | 1 Laporan   | 200.000.000 | 1 Laporan   | 200.000.000 |        |    |        |    | 1 Laporan   | 600.000.000   | DPKP NTB | Kota Mataram |              |
|        |         | 2.23.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |  | 2 Dokumen                                     | 20.000.000    | 2 Dokumen   | 20.000.000  | 2 Dokumen   | 20.000.000  |        |    |        |    | 2 Dokumen   | 60.000.000    | DPKP NTB | Kota Mataram |              |
|        |         | 2.23.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |  | -   | -             | -           | -           | -           | -           |        |    |        |    | -   | -             | DPKP NTB | Kota Mataram |              |
|        |         | 2.23.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah  |  | 10 Unit                                       | 1.100.000.000 | 10 Unit     | 650.000.000 | 10 Unit     | 650.000.000 |        |    |        |    | 10 Unit   | 2.400.000.000 | DPKP NTB | Kota Mataram |              |
|        |         | 2.23.01.1.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   |  | -   | -             | -           | -           | -           | -           |        |    |        |    | -   | -             | DPKP NTB | Kota Mataram |              |
|        |         | 2.23.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                 |  | 1 Unit  | 450.000.000   | -           | -           | -           | -           |        |    |        |    | 1 Unit  | 450.000.000   | DPKP NTB | Kota Mataram |              |
|        |         | 2.23.01.1.07.0003 | Pengadaan Alat Besar   | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan  |  | -   | -             | -           | -           | -           | -           |        |    |        |    | -   | -             | DPKP NTB | Kota Mataram |              |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)                     | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |           |               |           |               |        |    |        |    | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab                | Lokasi        |          |              |
|--------|---------|-------------------|--|--|--|---|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------|----|--------|----|---|---------------|----------|--------------|
|        |         |                   |  |  |  | 2024  |               | 2025      |               | 2026      |               | 2027   |    | 2028   |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |               |          |              |
|        |         |                   |  |  |  | Target  | Rp            | Target    | Rp            | Target    | Rp            | Target | Rp | Target | Rp | Target  | Rp            |          |              |
|        |         | 2.23.01.1.07.0004 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                                   | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan                                   |  | -   | -             | -         | -             | -         | -             | -      | -  | -      | -  | -   | -             | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |  | 1 Paket                                       | 200.000.000   | 1 Paket   | 200.000.000   | 2 Paket   | 200.000.000   |        |    |        |    | 2 Paket   | 600.000.000   | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  |  | 8 Unit  | 450.000.000   | 8 Unit    | 450.000.000   | 8 Unit    | 450.000.000   |        |    |        |    | 8 Unit  | 1.350.000.000 | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya   | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan   |  | -   | -             | -         | -             | -         | -             | -      | -  | -      | -  | -   | -             | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.07.0008 | Pengadaan Aset yang Tak Berwujud   | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan  |  | -   | -             | -         | -             | -         | -             | -      | -  | -      | -  | -   | -             | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                |  | -   | -             | -         | -             | -         | -             | -      | -  | -      | -  | -   | -             | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           |  | -   | -             | -         | -             | -         | -             | -      | -  | -      | -  | -   | -             | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |  | -   | -             | -         | -             | -         | -             | -      | -  | -      | -  | -   | -             | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                                     |  | 100%  | 1.170.000.000 | 100%      | 1.175.000.000 | 100%      | 1.180.000.000 |        |    |        |    | 100%  | 3.525.000.000 | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  | 2 Laporan                                     | 10,000,000    | 2 Laporan | 10,000,000    | 2 Laporan | 10,000,000    |        |    |        |    | 2 Laporan   | 30.000.000    | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         |  | 4 Laporan                                     | 350.000.000   | 4 Laporan | 350.000.000   | 4 Laporan | 350.000.000   |        |    |        |    | 4 Laporan   | 1.050.000.000 | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               |  | -   | -             | -         | -             | -         | -             | -      | -  | -      | -  | -   | -             | DPKP NTB | Kota Mataram |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)                             | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |            |             |            |             |        |    |        |    | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab                | Lokasi        |          |              |
|--------|---------|-------------------|--|--|--|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------|----|--------|----|---|---------------|----------|--------------|
|        |         |                   |  |  |  | 2024  |             | 2025       |             | 2026       |             | 2027   |    | 2028   |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |               |          |              |
|        |         |                   |  |  |  | Target  | Rp          | Target     | Rp          | Target     | Rp          | Target | Rp | Target | Rp | Target  | Rp            |          |              |
|        |         | 2.23.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |  | 24 Laporan                                    | 810.000.000 | 24 Laporan | 815.000.000 | 24 Laporan | 820.000.000 |        |    |        |    | 24 Laporan  | 2.445.000.000 | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara                       |  | 48 Unit                                       | 385.000.000 | 48 Unit    | 385.000.000 | 48 Unit    | 385.000.000 |        |    |        |    | 48 Unit   | 1.155.000.000 | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |  | 7 Unit  | 115.000.000 | 7 Unit     | 115.000.000 | 7 Unit     | 115.000.000 |        |    |        |    | 7 Unit  | 345.000.000   | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |  | 41 Unit                                       | 20.000.000  | 41 Unit    | 20.000.000  | 41 Unit    | 20.000.000  |        |    |        |    | 41 Unit   | 60.000.000    | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar  | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya  |  | -   | -           | -          | -           | -          | -           | -      | -  | -      | -  | -   | -             | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.09.0004 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat                                 | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya                    |  | -   | -           | -          | -           | -          | -           | -      | -  | -      | -  | -   | -             | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.09.0005 | Pemeliharaan Mebel   | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |  | -   | -           | -          | -           | -          | -           | -      | -  | -      | -  | -   | -             | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  |  | 48 Unit                                       | 100.000.000 | 48 Unit    | 100.000.000 | 48 Unit    | 100.000.000 |        |    |        |    | 48 Unit   | 300.000.000   | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya  | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara  |  | -   | -           | -          | -           | -          | -           | -      | -  | -      | -  | -   | -             | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud   | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara   |  | -   | -           | -          | -           | -          | -           | -      | -  | -      | -  | -   | -             | DPKP NTB | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi                              |  | 2 Unit  | 75.000.000  | 2 Unit     | 75.000.000  | 2 Unit     | 75.000.000  |        |    |        |    | 2 Unit  | 225.000.000   | DPKP NTB | Kota Mataram |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)                                | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |        |            |        |            |        |    |        |    | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab                | Lokasi      |              |              |
|--------|---------|-------------------|--|---|--|---|------------|--------|------------|--------|------------|--------|----|--------|----|---|-------------|--------------|--------------|
|        |         |                   |  |   |  | 2024  |            | 2025   |            | 2026   |            | 2027   |    | 2028   |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |             |              |              |
|        |         |                   |  |   |  | Target  | Rp         | Target | Rp         | Target | Rp         | Target | Rp | Target | Rp | Target  | Rp          |              |              |
|        |         | 2.23.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi           |  | -   |            | -      |            | -      |            | -      |    | -      | -  | -   | DPKP NTB    | Kota Mataram |              |
|        |         | 2.23.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi |  | 2 Unit  | 75.000.000 | 2 Unit | 75.000.000 | 2 Unit | 75.000.000 |        |    |        |    | 2 Unit  | 225.000.000 | DPKP NTB     | Kota Mataram |
|        |         | 2.23.01.1.09.0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah  | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi  |  | -   |            | -      |            | -      |            | -      |    | -      | -  | -   | -           | DPKP NTB     | Kota Mataram |

| Tujuan                                      | Sasaran                               | Kode   | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |               |                 |               |    |        |    |                  |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab                | Lokasi              |                     |
|---|---------------------------------------|--|--|--|--|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----|--------|----|------------------|----------------|---|---------------------|---------------------|
|   |                                       |  |  |  |  | 2024  |                 | 2025          |                 | 2026          |    | 2027   |    | 2028             |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                     |                     |
|   |                                       |  |  |  |  | Target  | Rp              | Target        | Rp              | Target        | Rp | Target | Rp | Target           | Rp             | Target  | Rp                  |                     |
| Terwujudnya pembangunan literasi masyarakat |                                       |  |  | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                                     |  |   |                 |               |                 |               |    |        |    |                  |                |   | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |
|   | Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan |  |  | Angka Kunjungan Pemustaka  |  |   |                 |               |                 |               |    |        |    |                  |                |   | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |
|   |                                       |  |  | Persentase Jangkauan Layanan Perpustakaan Mobile ke Desa                   |  |   |                 |               |                 |               |    |        |    |                  |                |   |                     |                     |
|   | 2.23.02                               | Program Pembinaan Perpustakaan   | Persentase Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan   |  | 100%                                     | 6.950.000.000                                 | 100%            | 4.472.500.000 | 100 %           | 4.496.125.000 |    |        |    |                  | 100 %          | 15.918.625.000  | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |
|   | 2.23.02.1.01                          | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi   | Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan   |  | 60 Perpustakaan                          | 3.800.000.000                                 | 63 Perpustakaan | 3.822.500.000 | 65 Perpustakaan | 3.846.125.000 |    |        |    | 188 Perpustakaan | 11.468.625.000 | DPKP NTB  | Nusa Tenggara Barat |                     |
|   | 2.23.02.1.01.0002                     | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi   | Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya  |  | 50 Perpustakaan                          | 300.000.000                                   | 53 Perpustakaan | 315.000.000   | 55 Perpustakaan | 330.750.000   |    |        |    | 55 Perpustakaan  | 945,750,000    | DPKP NTB  | Nusa Tenggara Barat |                     |
|   | 2.23.02.1.01.0003                     | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi   | Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan   |  | -  | -   | -               | -             | -               | -             | -  | -      | -  | -                | -              | -   | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |
|   | 2.23.02.1.01.0004                     | Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan |  | 20 Perpustakaan                          | 150.000.000                                   | 21 Perpustakaan | 157.500.000   | 23 Perpustakaan | 165.375.000   |    |        |    | 23 Perpustakaan  | 472,875,000    | DPKP NTB  | Nusa Tenggara Barat |                     |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                  |               |                  |               |        |    |        |    | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab                | Lokasi        |                     |                     |
|--------|---------|-------------------|--|---|--|---|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--------|----|--------|----|---|---------------|---------------------|---------------------|
|        |         |                   |  |   |  | 2024  |               | 2025             |               | 2026             |               | 2027   |    | 2028   |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |               |                     |                     |
|        |         |                   |  |   |  | Target  | Rp            | Target           | Rp            | Target           | Rp            | Target | Rp | Target | Rp | Target  | Rp            |                     |                     |
|        |         | 2.23.02.1.01.0005 | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi                                   | Jumlah Perpustakaan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar rasional perpustakaan                              | -  | -   | -             | -                | -             | -                | -             | -      | -  | -      | -  | -   | DPKP NTB      | Nusa Tenggara Barat |                     |
|        |         | 2.23.02.1.01.0006 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi |  | 100 Orang                                     | 150.000.000   | 100 Orang        | 150.000.000   | 100 Orang        | 150.000.000   | -      | -  | -      | -  | 100 Orang   | 450.000.000   | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.23.02.1.01.0007 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                | Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi                                     | -  | -   | -             | -                | -             | -                | -             | -      | -  | -      | -  | -   | -             | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.23.02.1.01.0008 | Pengembangan Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan                              | Jumlah Perpustakaan Deposit yang dikembangkan   |  | -   | -             | -                | -             | -                | -             | -      | -  | -      | -  | -   | -             | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.23.02.1.01.0009 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka                                       | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan                                    |  | 20.000 Eksemplar                              | 1.500.000.000 | 20.000 Eksemplar | 1.500.000.000 | 20.000 Eksemplar | 1.500.000.000 | -      | -  | -      | -  | 20.000 Eksemplar  | 4.500.000.000 | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.23.02.1.01.0011 | Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat                 | Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat   |  | 8.500 Dokumen                                 | 850.000.000   | 9.000 Dokumen    | 850.000.000   | 9.500 Dokumen    | 850.000.000   | -      | -  | -      | -  | 8.500 Dokumen   | 2.550.000.000 | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.23.02.1.01.0012 | Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Provinsi                     | Capaian tingkat gemar membaca masyarakat tingkat Provinsi   |  | 62 Nilai                                      | 200.000.000   | 62 Nilai         | 200.000.000   | 62 Nilai         | 200.000.000   | -      | -  | -      | -  | 62 Nilai  | 600.000.000   | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.23.02.1.01.0013 | Pengukuran Angka Kunjungan Pemustaka Tingkat Provinsi                            | Capaian Angka Kunjungan Pemustaka tingkat Provinsi  |  | -   | -             | -                | -             | -                | -             | -      | -  | -      | -  | -   | -             | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.23.02.1.01.0014 | Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi                             | Jumlah kerjasama dan peningkatan kegemaran membaca dan literasi   |  | 1 Dokumen                                     | 100.000.000   | 1 Dokumen        | 100.000.000   | 1 Dokumen        | 100.000.000   | -      | -  | -      | -  | 1 Dokumen   | 300.000.000   | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |

| Tujuan | Sasaran | Kode   | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                  |             |                  |             |        |    |        |       | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab                | Lokasi        |                     |                     |
|--------|---------|--|---|---|--|---|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|----|--------|-------|---|---------------|---------------------|---------------------|
|        |         |  |   |   |  | 2024  |               | 2025             |             | 2026             |             | 2027   |    | 2028   |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |               |                     |                     |
|        |         |  |   |   |  | Target  | Rp            | Target           | Rp          | Target           | Rp          | Target | Rp | Target | Rp    | Target  | Rp            |                     |                     |
|        |         | 2.23.02.1.01.0015                                    | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik   | Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan diperlihara dengan Manajemen Layanan TIK                                   |  | 10 Perpustakaan                               | 350.000.000   | 10 Perpustakaan  | 350.000.000 | 10 Perpustakaan  | 350.000.000 |        |    |        |       | 10 Perpustakaan   | 1.050.000.000 | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.23.02.1.01.0016                                    | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan  | Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan  |  | 1 Dokumen                                     | 200.000.000   | 1 Dokumen        | 200.000.000 | 1 Dokumen        | 200.000.000 |        |    |        |       | 1 Dokumen   | 600.000.000   | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.23.02.1.02   | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi   | Jumlah kegiatan Pengembangan Minat dan Bacaan   |  | 8 Kegiatan/Lokus                              | 3.150.000.000 | 8 Kegiatan/Lokus | 650.000.000 | 8 Kegiatan/Lokus | 650.000.000 |        |    |        |       | 8 Kegiatan/Lokus  | 4.450.000.000 | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.23.02.1.02.0001                                    | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat |  | 10 Lokus                                      | 100.000.000   | 10 Lokus         | 100.000.000 | 10 Lokus         | 100.000.000 |        |    |        |       | 10 Lokus  | 300.000.000   | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.23.02.1.02.0002                                    | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi      | Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                 |  | 1 Perpustakaan                                | 2.500.000.000 | -                | -           | -                | -           |        |    |        |       | 1 Perpustakaan  | 2.500.000.000 | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.23.02.1.02.0003                                    | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca  | Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca  |  | 10 Orang                                      | 100.000.000   | 10 Orang         | 100.000.000 | 10 Orang         | 100.000.000 | -      | -  | -      | -     | 10 Orang  | 300.000.000   | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.23.02.1.02.0004                                    | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial   | Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan                                       |  | 10 Perpustakaan                               | 300.000.000   | 10 Perpustakaan  | 300.000.000 | 10 Perpustakaan  | 300.000.000 |        |    |        |       | 10 Perpustakaan   | 900.000.000   | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.23.02.1.02.0006                                    | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi   | Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya  |  | 2 Orang                                       | 150.000.000   | 2 Orang          | 150.000.000 | 2 Orang          | 150.000.000 | -      | -  | -      | -     | 2 Orang   | 450.000.000   | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |
|        | 2.23.03 | Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | Percentase Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah  |   | 100 %                                    | 197.000.000                                   | 100 %         | 197.000.000      | 100 %       | 197.000.000      |             |        |    |        | 100 % | 591.000.000   | DPKP NTB      | Nusa Tenggara Barat |                     |
|        |         | 2.23.03.1.01   | Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekan   | Jumlah Pengelolaan Karya Cetak Karya Rekan  |  | 300 Eksemplar                                 | 95.000.000    | 300 Eksemplar    | 95.000.000  | 300 Eksemplar    | 95.000.000  |        |    |        |       | 300 Eksemplar   | 285.000.000   | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.23.03.1.01.0001                                    | Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekan   | Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR  |  | 300 Eksemplar                                 | 25.000.000    | 300 Eksemplar    | 25.000.000  | 300 Eksemplar    | 25.000.000  |        |    |        |       | 300 Eksemplar   | 75.000.000    | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |               |            |               |            |        |    |        |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab                | Lokasi   |                     |
|--------|---------|-------------------|---|---|--|---|------------|---------------|------------|---------------|------------|--------|----|--------|---------------|---|----------|---------------------|
|        |         |                   |   |   |  | 2024  |            | 2025          |            | 2026          |            | 2027   |    | 2028   |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |          |                     |
|        |         |                   |   |   |  | Target  | Rp         | Target        | Rp         | Target        | Rp         | Target | Rp | Target | Rp            | Target  | Rp       |                     |
|        |         | 2.23.03.1.01.0002 | Pemberian Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam |  | 10 Penerbit                                   | 70.000.000 | 10 Penerbit   | 70.000.000 | 10 Penerbit   | 70.000.000 |        |    |        | 10 Penerbit   | 210.000.000   | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.23.03.1.02      | Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah  | Jumlah Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah  |  | 500 Eksemplar                                 | 35.000.000 | 500 Eksemplar | 35.000.000 | 500 Eksemplar | 35.000.000 |        |    |        | 500 Eksemplar | 105.000.000   | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.23.03.1.02.0001 | Penerbitan Katalog Induk Daerah   | Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan  |  | 1.500 Entry                                   | 25.000.000 | 1.500 Entry   | 25.000.000 | 1.500 Entry   | 25.000.000 |        |    |        | 1.500 Entry   | 75.000.000  | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.23.03.1.02.0002 | Penerbitan Bibliografi Daerah   | Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan  |  | 10 Naskah                                     | 10.000.000 | 10 Naskah     | 10.000.000 | 10 Naskah     | 10.000.000 |        |    |        | 10 Naskah     | 30.000.000  | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.23.03.1.03      | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi   | Jumlah Pengelolaan dan Pelestarian Naskah Kuno Daerah   |  | 10 Eksemplar                                  | 50.000.000 | 10 Eksemplar  | 50.000.000 | 10 Eksemplar  | 50.000.000 |        |    |        | 10 Eksemplar  | 150.000.000   | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.23.03.1.03.0001 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno                              | Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno   |  | 20 Orang                                      | 25.000.000 | 20 Orang      | 25.000.000 | 20 Orang      | 25.000.000 |        |    |        | 20 Orang      | 75.000.000  | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.23.03.1.03.0002 | Pengembangan Pengolahan dan Pengalihmedialan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan           | Jumlah Naskah Kunyah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan                         |  | 10 Eksemplar                                  | 25.000.000 | 10 Eksemplar  | 25.000.000 | 10 Eksemplar  | 25.000.000 |        |    |        | 10 Eksemplar  | 75.000.000  | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.23.03.1.04      | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi  | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Daerah Provinsi yang Tersedia   |  | 400 Eksemplar                                 | 17.000.000 | 400 Eksemplar | 17.000.000 | 400 Eksemplar | 17.000.000 |        |    |        | 400 Eksemplar | 51.000.000  | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.23.03.1.04.0001 | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara  | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi                      |  | 200 Eksemplar                                 | 15.000.000 | 200 Eksemplar | 15.000.000 | 200 Eksemplar | 15.000.000 |        |    |        | 200 Eksemplar | 45.000.000  | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |

| Tujuan  | Sasaran   | Kode  | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)   | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |               |               |               |               |             |    |        |    | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab                | Lokasi        |                     |                     |
|---|---|---|---|--|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----|--------|----|---|---------------|---------------------|---------------------|
|   |   |   |   |  |  | 2024  |               | 2025          |               | 2026          |               | 2027        |    | 2028   |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |               |                     |                     |
|   |   |   |   |  |  | Target  | Rp            | Target        | Rp            | Target        | Rp            | Target      | Rp | Target | Rp | Target  | Rp            |                     |                     |
|   |   | 2.23.03.1.04.0002   | Pengolahan dan Penyiaran Koleksi Budaya Etnis Nusantara                                       | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Didolah dan Dilakukan penyiaran oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi |  | 200 Eksemplar                                 | 2.000.000     | 200 Eksemplar | 2.000.000     | 200 Eksemplar | 2.000.000     |             |    |        |    | 200 Eksemplar   | 6.000.000     | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |
| Terwujudnya Tertib Arsip Dalam Penyelenggaraan Kearsipan pada Pemerintah Provinsi NTB |   |   |   | Percentase Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota dengan Nilai Pengawasan Kearsipan B Ke Atas                             |  |   |               |               |               |               |               |             |    |        |    |   |               | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |
|   | Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib |   |   | Percentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib   |  |   |               |               |               |               |               |             |    |        |    |   |               | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |
|   |   |   |   | Percentase Arsip yang Terselamatkan  |  |   |               |               |               |               |               |             |    |        |    |   |               |                     |                     |
|   | 2.24.02   | Program Pengelolaan Arsip   | Percentase Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis   |  | 100 %                                    | 2.024.985.600                                 | 100 %         | 2.024.985.600 | 100 %         | 2.024.985.600 | 100 %         |             |    |        |    | 100 %   | 6.074.956.800 | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |
|   | 2.24.02.1.01  | Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi  | Jumlah Pengolahan Arsip Dinamis   |  | 10,000 Berkas                            | 980.000.000                                   | 10,000 Berkas | 980.000.000   | 10,000 Berkas | 980.000.000   | 10,000 Berkas | 980.000.000 |    |        |    | 10.000 Berkas   | 2.940.000.000 | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |
|   | 2.24.02.1.01.0003   | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi                                      | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi                             |  | 17 Laporan                               | 100.000.000                                   | 17 Laporan    | 100.000.000   | 17 Laporan    | 100.000.000   | 17 Laporan    | 100.000.000 |    |        |    | 17 Laporan  | 300.000.000   | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |
|   | 2.24.02.1.01.0004   | Penyusutan Arsip Dinamis  | Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan  |  | 10.000 Arsip                             | 80.000.000                                    | 10.000 Arsip  | 80.000.000    | 10.000 Arsip  | 80.000.000    | 10.000 Arsip  | 80.000.000  |    |        |    | 10.000 Arsip  | 240.000.000   | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |
|   | 2.24.02.1.01.0005   | Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi                              | Jumlah arsip yang di alih medilikan dan diautentikasi   |  | 500 Arsip                                | 400.000.000                                   | 500 Arsip     | 400.000.000   | 500 Arsip     | 400.000.000   | 500 Arsip     | 400.000.000 |    |        |    | 500 Arsip   | 1.200.000.000 | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |
|   | 2.24.02.1.01.0006   | Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis   | Jumlah daftar arsip dinamis   |  | 1 Arsip                                  | 400.000.000                                   | 1 Arsip       | 400.000.000   | 1 Arsip       | 400.000.000   | 1 Arsip       | 400.000.000 |    |        |    | 1 Arsip   | 1.200.000.000 | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |
|   | 2.24.02.1.02  | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi  | Jumlah Arsip Statis yang Terselamatkan dan Dilestarikan                                       |  | 5,000 Arsip                              | 400.000.000                                   | 5,000 Arsip   | 400.000.000   | 5,000 Arsip   | 400.000.000   | 5,000 Arsip   | 400.000.000 |    |        |    | 5,000 Arsip   | 1.200.000.000 | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |
|   | 2.24.02.1.02.0001   | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI | Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI |  | -  | -   | -             | -             | -             | -             | -             | -           |    |        | -  | -   | DPKP NTB      | Nusa Tenggara Barat |                     |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)                           | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |              |             |              |             |        |    |        |    | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi        |          |                     |
|--------|---------|-------------------|--|--|--|---|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------|----|--------|----|--|---------------|----------|---------------------|
|        |         |                   |  |  |  | 2024  |             | 2025         |             | 2026         |             | 2027   |    | 2028   |    |  |               |          |                     |
|        |         |                   |  |  |  | Target  | Rp          | Target       | Rp          | Target       | Rp          | Target | Rp | Target | Rp |  |               |          |                     |
|        |         | 2.24.02.1.02.0003 | Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan                               | Jumlah orang yang diwawancarai   |  | 2 Orang                                       | 50.000.000  | 2 Orang      | 50.000.000  | 2 Orang      | 50.000.000  |        |    |        |    | 2 Orang                                      | 150.000.000   | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.24.02.1.02.0004 | Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Penerbitan Naskah sumber Arsip                        | Jumlah penerbitan naskah sumber arsip  |  | -   | -           | -            | -           | -            | -           |        |    |        |    | -  | -             | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.24.02.1.02.0005 | Akuisisi Arsip Statis  | Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi  |  | 100 Arsip                                     | 350.000.000 | 100 Arsip    | 350.000.000 | 100 Arsip    | 350.000.000 |        |    |        |    | 100 Arsip                                    | 1.050.000.000 | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.24.02.1.03      | Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Karsipan Nasional Tingkat Provinsi            | Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Karsipan Nasional  |  | 15 Laporan                                    | 644.985.600 | 15 Laporan   | 644.985.600 | 15 Laporan   | 644.985.600 |        |    |        |    | 15 Laporan                                   | 1.934.956.800 | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.24.02.1.03.0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Karsipan Tingkat Daerah Prov Melalui JIKN                | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Karsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN |  | 500 Pengguna                                  | 370.000.000 | 500 Pengguna | 370.000.000 | 500 Pengguna | 370.000.000 |        |    |        |    | 500 Pengguna                                 | 1.110.000.000 | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.24.02.1.03.0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Karsipan dan Lembaga Karsipan Daerah Provinsi                        | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Karsipan dan Lembaga Karsipan Daerah Provinsi       |  | 15 Laporan                                    | 274.985.600 | 15 Laporan   | 274.985.600 | 15 Laporan   | 274.985.600 |        |    |        |    | 15 Laporan                                   | 824.956.800   | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.24.03           | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip  | Persentase Arsip yang Terselamatkan  |  | 100 %   | 50.000.000  | 100 %        | 50.000.000  | 100 %        | 50.000.000  |        |    |        |    | 100 %  | 150.000.000   | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.24.03.1.01      | Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | Jumlah Arsip yang Di Nilai   |  | 10,000 Arsip                                  | 50.000.000  | 10,000 Arsip | 50.000.000  | 10,000 Arsip | 50.000.000  |        |    |        |    | 10,000 Arsip                                 | 150.000.000   | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |              |            |              |            |        |    |        |    | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab                | Lokasi      |          |                     |
|--------|---------|-------------------|---|---|--|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------|----|--------|----|---|-------------|----------|---------------------|
|        |         |                   |   |   |  | 2024  |            | 2025         |            | 2026         |            | 2027   |    | 2028   |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |             |          |                     |
|        |         |                   |   |   |  | Target  | Rp         | Target       | Rp         | Target       | Rp         | Target | Rp | Target | Rp | Target  | Rp          |          |                     |
|        |         | 2.24.03.1.01.0001 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun                       | Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun                       |  | 10,000 Arsip                                  | 50.000.000 | 10,000 Arsip | 50.000.000 | 10,000 Arsip | 50.000.000 |        |    |        |    | 10,000 Arsip  | 150.000.000 | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.24.03.1.01.0002 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun  | Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan   |  | -   | -          | -            | -          | -            | -          | -      | -  | -      | -  | -   | -           | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.24.03.1.02      | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi   | Jumlah Arsip Daerah Provinsi yang Terselamatkan Akibat Bencana  |  | -   | -          | -            | -          | -            | -          | -      | -  | -      | -  | -   | -           | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.24.03.1.02.0001 | Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana  | Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana  |  | -   | -          | -            | -          | -            | -          | -      | -  | -      | -  | -   | -           | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.24.03.1.02.0002 | Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana  | Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana  |  | -   | -          | -            | -          | -            | -          | -      | -  | -      | -  | -   | -           | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.24.03.1.03      | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota            | Jumlah Arsip Daerah Provinsi yang digabung dan dibubar dan pemekaran daerah Kab/Kota  |  | -   | -          | -            | -          | -            | -          | -      | -  | -      | -  | -   | -           | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.24.03.1.03.0001 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi |  | -   | -          | -            | -          | -            | -          | -      | -  | -      | -  | -   | -           | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.24.03.1.03.0002 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi   | Jumlah Arsip Daerah yang di nilai   |  | -   | -          | -            | -          | -            | -          | -      | -  | -      | -  | -   | -           | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.24.03.1.03.0003 | Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi pemekaran Lintas Kabupaten/Kota  | Jumlah Arsip yang Terselamatkan   |  | -   | -          | -            | -          | -            | -          | -      | -  | -      | -  | -   | -           | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |        |    |        |    |        |    |        |    | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab                | Lokasi   |                     |
|--------|---------|-------------------|--|--|--|---|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|---|----------|---------------------|
|        |         |                   |  |  |  | 2024  |    | 2025   |    | 2026   |    | 2027   |    | 2028   |    | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |          |                     |
|        |         |                   |  |  |  | Target  | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target  | Rp       |                     |
|        |         | 2.24.03.1.04      | Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Karsipan Provinsi | Jumlah Arsip Digital yang dikelola oleh Lembaga Karsipan Provinsi          |  | -   | -  | -      | -  | -      | -  | -      | -  | -      | -  | -   | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.24.03.1.04.0001 | Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip             | Jumlah Arsip yang dinilai dan ditetapkan keabsahannya                      |  | -   | -  | -      | -  | -      | -  | -      | -  | -      | -  | -   | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.24.03.1.04.0002 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip             | Jumlah Arsip Digital yang memiliki Keabsahan Arsip                         |  | -   | -  | -      | -  | -      | -  | -      | -  | -      | -  | -   | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.24.03.1.05      | Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang   | Jumlah Arsip Statis yang Dilestarikan                                      |  | -   | -  | -      | -  | -      | -  | -      | -  | -      | -  | -   | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.24.03.1.05.01   | Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang                             | Jumlah Arsip Statis yang Dinilai   |  | -   | -  | -      | -  | -      | -  | -      | -  | -      | -  | -   | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.24.03.1.05.02   | Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang                                     | Jumlah Arsip Digital yang dinilai  |  | -   | -  | -      | -  | -      | -  | -      | -  | -      | -  | -   | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |
|        |         | 2.24.03.1.05.03   | Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)  | Jumlah Arsip yang terdata  |  | -   | -  | -      | -  | -      | -  | -      | -  | -      | -  | -   | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat |

## **6.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Program Unggulan Literasi Digital Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026**

Program pembangunan daerah adalah program prioritas yang akan dilaksanakan selama satu periode yang diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah dan isu strategis yang dihadapi dan memenuhi berbagai kebutuhan yang dirasakan dan lebih mendayagunakan pemanfaatan potensi daerah. Program pembangunan daerah merupakan pernyataan yang merupakan program kepala daerah Provinsi NTB yang berisi program prioritas yang bersifat strategis.

Target kinerja Sasaran Program yang telah ditetapkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB merupakan kondisi yang akan dicapai dan diharapkan dalam mendukung keberhasilan target kinerja sasaran strategis yang membawa pengaruh atau dampak (*outcome/impact*) dalam mewujudkan pembangunan literasi masyarakat dan kegemaran membaca masyarakat di Provinsi NTB.

Program perpustakaan literasi dan pengelolaan arsip secara tertib merupakan langkah strategi dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan ditandai dengan meningkatnya indeks literasi masyarakat dan pengelolaan arsip secara tertib pada perangkat daerah. Dimensi pembangunan bidang perpustakaan dan karsipan provinsi NTB dibangun dalam dua dimensi sasaran yaitu 1) Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan; dan 2) Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib. Melalui pengembangan, pembinaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran dan pengelolaan arsip secara tertib yang integrative, komprehensif, tematik, dan spasial diharapkan akan terwujud pembangunan kualitas sumber daya manusia serta perwujudan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan sehingga terbentuk masyarakat yang berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

Berdasarkan hal tersebut, target yang ingin dicapai di tahun 2023 adalah Meningkatnya Angka Kunjungan Pemustaka dan Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib melalui pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal kemudahan bagi pemustaka dalam mengakses

informasi yang dibutuhkan melalui aplikasi yang tersedia di pelayanan perpustakaan dan kearsipan (iDeposit, NTBelib, Inlislite, Srikandi dan JIKN).

Selanjutnya program utama pendukung program unggulan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2024-2026, sebagai berikut:

**Tabel. 6.2.1**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Program Unggulan**  
**Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026**

| Program Unggulan | Tujuan                                      | Sasaran           | Kode | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)                   | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                   |               |                   |               |   |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi              |                     |  |
|------------------|---|-------------------|------|---|--|--|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---|----------------|--|---------------------|---------------------|--|
|                  |   |                   |      |   |  |  | 2024  |               | 2025              |               | 2026              |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                |  |                     |                     |  |
|                  |   |                   |      |   |  |  | Target  | Rp            | Target            | Rp            | Target            | Rp            | Target  | Rp             |  |                     |                     |  |
|                  | Terwujudnya pembangunan literasi masyarakat |                   |      |   | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat   |  |   |               |                   |               |                   |               |   |                |  | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |  |
|                  | Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan       |                   |      |   | Angka Kunjungan Pemustaka  |  |   |               |                   |               |                   |               |   |                |  | DPKP NTB            | Nusa Tenggara Barat |  |
|                  |   |                   |      |   | Persentase Jangkauan Layanan Perpustakaan Mobile ke Desa                                     |  |   |               |                   |               |                   |               |   |                |  |                     |                     |  |
|                  |   | 2.23.02           |      | Program Pembinaan Perpustakaan  | Persentase Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan                               |  | 100%  | 6.950.000.000 | 100%              | 4.472.500.000 | 100 %             | 4.496.125.000 | 100 %   | 15.918.625.000 | DPKP NTB                                     | Nusa Tenggara Barat |                     |  |
|                  |   | 2.23.02.1.01      |      | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi                      | Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan   |  | 60 Perpustakaan                               | 3.800.000.000 | 63 Perpustakaan   | 3.822.500.000 | 65 Perpustakaan   | 3.846.125.000 | 188 Perpustakaan  | 11.468.625.000 | DPKP NTB                                     | Nusa Tenggara Barat |                     |  |
|                  |   | 2.23.02.1.01.0015 |      | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik         | Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK |  | 10 Perpustakaan                               | 350.000.000   | 10 Perpustakaan   | 350.000.000   | 10 Perpustakaan   | 350.000.000   | 10 Perpustakaan   | 1.050.000.000  | DPKP NTB                                     | Nusa Tenggara Barat |                     |  |
|                  |   | 2.23.02.1.02      |      | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi                     | Jumlah kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca   |  | 8 Kegiatan/ Lokus                             | 3.150.000.000 | 8 Kegiatan/ Lokus | 650.000.000   | 8 Kegiatan/ Lokus | 650.000.000   | 8 Kegiatan/ Lokus   | 4.450.000.000  | DPKP NTB                                     | Nusa Tenggara Barat |                     |  |
|                  |   | 2.23.02.1.02.0004 |      | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                         | Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan    |  | 10 Perpustakaan                               | 300.000.000   | 10 Perpustakaan   | 300.000.000   | 10 Perpustakaan   | 300.000.000   | 10 Perpustakaan   | 900.000.000    | DPKP NTB                                     | Nusa Tenggara Barat |                     |  |
|                  |   | 2.23.03           |      | Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno                  | Persentase Pelestarian KCCR dan Naskah Kuno Milik Daerah                                     |  | 100 %   | 197.000.000   | 100 %             | 197.000.000   | 100 %             | 197.000.000   | 100 %   | 591.000.000    | DPKP NTB                                     | Nusa Tenggara Barat |                     |  |
|                  |   | 2.23.03.1.01      |      | Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam                               | Jumlah Pengelolaan Karya Cetak Karya Rekam   |  | 300 Eksemplar                                 | 95.000.000    | 300 Eksemplar     | 95.000.000    | 300 Eksemplar     | 95.000.000    | 300 Eksemplar   | 285.000.000    | DPKP NTB                                     | Nusa Tenggara Barat |                     |  |
|                  |   | 2.23.03.1.01.0001 |      | Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | Jumlah Pengelolaan Koleksi Deposit yang Tersedia   |  | 300 Eksemplar                                 | 25.000.000    | 300 Eksemplar     | 25.000.000    | 300 Eksemplar     | 25.000.000    | 300 Eksemplar   | 75.000.000     | DPKP NTB                                     | Nusa Tenggara Barat |                     |  |

| Program Unggulan  | Tujuan | Sasaran   | Kode   | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |               |               |               |               |   |          | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |  |  |
|---|--------|---|--|---|--|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|----------|--|--------|--|--|
|   |        |   |  |   |  |  | 2024  |               | 2025          |               | 2026          |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |          |  |        |  |  |
|   |        |   |  |   |  |  | Target  | Rp            | Target        | Rp            | Target        | Rp            | Target  | Rp       |  |        |  |  |
|   |        | 2.23.03.1.02  | Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah   | Jumlah Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi   |  | 500 Eksemplar                            | 35.000.000                                    | 500 Eksemplar | 35.000.000    | 500 Eksemplar | 35.000.000    | 500 Eksemplar | 105.000.000   | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat                          |        |  |  |
|   |        | 2.23.03.1.02.0001   | Penerbitan Katalog Induk Daerah  | Jumlah Katalog Induk Daerah yang dilayangkan  |  | 1.500 Entry                              | 25.000.000                                    | 1.500 Entry   | 25.000.000    | 1.500 Entry   | 25.000.000    | 1.500 Entry   | 75.000.000  | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat                          |        |  |  |
|   |        | 2.23.03.1.02.0002   | Penerbitan Bibliografi Daerah  | Jumlah Bibliografi Daerah yang tersedia di deposit  |  | 10 Naskah                                | 10.000.000                                    | 10 Naskah     | 10.000.000    | 10 Naskah     | 10.000.000    | 10 Naskah     | 30.000.000  | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat                          |        |  |  |
|   |        | 2.23.03.1.03  | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi  | Jumlah Pengelolaan dan Pelestarian Naskah Kuno Daerah   |  | 10 Eksemplar                             | 50.000.000                                    | 10 Eksemplar  | 50.000.000    | 10 Eksemplar  | 50.000.000    | 10 Eksemplar  | 150.000.000   | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat                          |        |  |  |
|   |        | 2.23.03.1.03.0002   | Pengembangan Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan | Jumlah Naskah Kunyah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan |  | 10 Eksemplar                             | 25.000.000                                    | 10 Eksemplar  | 25.000.000    | 10 Eksemplar  | 25.000.000    | 10 Eksemplar  | 75.000.000  | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat                          |        |  |  |
| Terwujudnya Aritib Arsip Dalam Penyelenggaraan Kearsipan pada Pemerintah Provinsi NTB |        |   |  | Persentase Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota dengan Nilai Pengawasan Kearsipan B Ke Atas                            |  |  |   |               |               |               |               |               |   | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat                          |        |  |  |
|   |        | Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib |  | Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib  |  |  |   |               |               |               |               |               |   | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat                          |        |  |  |
|   |        |   |  | Persentase Arsip yang Terselamatkan   |  |  |   |               |               |               |               |               |   |          |  |        |  |  |
|   |        | 2.24.02   | Program Pengelolaan Arsip  | Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis   |  | 100 %                                    | 2.024.985.600                                 | 100 %         | 2.024.985.600 | 100 %         | 2.024.985.600 | 100 %         | 6.074.956.800   | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat                          |        |  |  |
|   |        | 2.24.02.1.01  | Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi   | Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis  |  | 10,000 Berkas                            | 980.000.000                                   | 10,000 Berkas | 980.000.000   | 10,000 Berkas | 980.000.000   | 10,000 Berkas | 2.940.000.000   | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat                          |        |  |  |
|   |        | 2.24.02.1.01.0003   | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi   |  | 17 Laporan                               | 100.000.000                                   | 17 Laporan    | 100.000.000   | 17 Laporan    | 100.000.000   | 17 Laporan    | 300.000.000   | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat                          |        |  |  |
|   |        | 2.24.02.1.01.0005   | Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentifikasi   | Jumlah Arsip yang di alih medikan dan diautentifikasi   |  | 500 Arsip                                | 400.000.000                                   | 500 Arsip     | 400.000.000   | 500 Arsip     | 400.000.000   | 500 Arsip     | 1.200.000.000   | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat                          |        |  |  |

| Program Unggulan | Tujuan | Sasaran           | Kode  | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |              |             |              |             |              |   |          | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |  |  |
|------------------|--------|-------------------|---|---|--|--|---|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---|----------|--|--------|--|--|
|                  |        |                   |   |   |  |  | 2024  |              | 2025        |              | 2026        |              | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |          |  |        |  |  |
|                  |        |                   |   |   |  |  | Target  | Rp           | Target      | Rp           | Target      | Rp           | Target  | Rp       |  |        |  |  |
|                  |        | 2.24.02.1.02      | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi  | Jumlah Arsip Statis yang Terselamatkan dan Dilestarikan   |  | 5,000 Arsip                              | 400.000.000                                   | 5,000 Arsip  | 400.000.000 | 5,000 Arsip  | 400.000.000 | 5,000 Arsip  | 1.200.000.000   | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat                          |        |  |  |
|                  |        | 2.24.02.1.02.0005 | Akuisisi Arsip Statis   | Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi   |  | 100 Arsip                                | 350.000.000                                   | 100 Arsip    | 350.000.000 | 100 Arsip    | 350.000.000 | 100 Arsip    | 1.050.000.000   | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat                          |        |  |  |
|                  |        | 2.24.02.1.03      | Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi                  | Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan nasional  |  | 15 Laporan                               | 644.985.600                                   | 15 Laporan   | 644.985.600 | 15 Laporan   | 644.985.600 | 15 Laporan   | 1.934.956.800   | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat                          |        |  |  |
|                  |        | 2.24.02.1.03.0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Prov Melalui JIKN                      | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN                               |  | 500 Pengguna                             | 370.000.000                                   | 500 Pengguna | 370.000.000 | 500 Pengguna | 370.000.000 | 500 Pengguna | 1.110.000.000   | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat                          |        |  |  |
|                  |        | 2.24.03           | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip   | Persentase Arsip yang Terselamatkan   |  | 100%                                     | 50.000.000                                    | 100%         | 50.000.000  | 100%         | 50.000.000  | 100%         | 150.000.000   | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat                          |        |  |  |
|                  |        | 2.24.03.1.01      | Pemusnahan Arsip Dilengkung Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun          | Jumlah Arsip yang di Nilai  |  | 10.000 Arsip                             | 50.000.000                                    | 10.000 Arsip | 50.000.000  | 10.000 Arsip | 50.000.000  | 10.000 Arsip | 150.000.000   | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat                          |        |  |  |
|                  |        | 2.24.03.1.01.0001 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun |  | 10.000 Arsip                             | 50.000.000                                    | 10.000 Arsip | 50.000.000  | 10.000 Arsip | 50.000.000  | 10.000 Arsip | 150.000.000   | DPKP NTB | Nusa Tenggara Barat                          |        |  |  |

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, yang dikelompokkan kedalam masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pada akhir periode Renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka indikator kinerja daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengacu pada Definisi dan Teknik Pengukuran Indikator Kinerja Utama, berikut Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, sebagaimana dalam tabel 7.1.1.

**Tabel 7.1.1 Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB**

| No. | Indikator  | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Kinerja Sasaran |           |        |           |        |           | Kondisi Kerja pada akhir periode RPJMD | Keterangan  |  |  |
|-----|--|---|------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--|---|--|--|
|     |  |   | 2024                   |           | 2025   |           | 2026   |           |  |   |  |  |
|     |  |   | Target                 | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |  |   |  |  |
| 1.  | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                   | Nilai                                   | 68,5                   | -         | 69     | -         | 70     | -         | -                                      | <b>Formulasi:</b><br>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang dirilis oleh Perpustakaan Nasional RI setiap tahun                                   |  |  |
| 2.  | Persentase Jangkauan Layanan Perpustakaan Mobile ke Desa | %                                       | 20                     | -         | 25     | -         | 30     | -         | -                                      | <b>Formulasi:</b><br>Jumlah desa/ kelurahan yang dikunjungi perpustakaan keliling setiap tahun dibagi jumlah seluruh desa/ kelurahan di provinsi NTB x 100% |  |  |
| 3.  | Persentase Arsip yang Terselamatkan                      | %                                       | 100                    | -         | 100    | -         | 100    | -         | -                                      | <b>Formulasi:</b><br>$\frac{\Sigma \text{arsip yang terselamatkan}}{\Sigma \text{arsip yang ada}} \times 100\%$   |  |  |

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 yang telah disusun melalui suatu alur atau proses yang baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melalui pemikiran dan diskusi yang mendalam tentang rumusan perencanaan yang strategis bagi kegiatan perpustakaan dan karsipan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan, seharusnya dapat dijadikan tolok ukur atau acuan dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*) dan manfaat (*benefit*) yang sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 diharapkan dapat dilaksanakan atau terwujud sebagaimana mestinya dan konkritnya dapat menggambarkan penampilan perencanaan (*performance planning*) yang mudah dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) maupun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi NTB merupakan dokumen perencanaan dan program tahun 2024-2026 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi NTB dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini.

Upaya dalam mewujudkan pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026 dilakukan dengan perumusan tujuan jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi NTB, yaitu 1) Terwujudnya pembangunan literasi masyarakat dengan Indikator tujuan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat; 2) Terwujudnya Tertib Arsip dalam Penyelenggaraan Karsipan pada Pemerintah Provinsi NTB dengan indikator tujuan Persentase Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota dengan Nilai Pengawasan Karsipan B Ke Atas, dengan 2 sasaran yaitu 1) Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan dengan indikator sasaran Angka Kunjungan Pemustaka; 2) Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib dengan indikator sasaran Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Awal Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staf. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada rencana strategis ini.